



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

Laporan Keuangan

T.A. 2024

Audited

BAGIAN ANGGARAN 065



**LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
AUDITED
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta Selatan 12190

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, **09 MAY 2025**

Menteri Investasi dan Hilirisasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	60
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	70
F. Pengungkapan Penting Lainnya	73
VI. Lampiran dan Daftar	77



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM
(AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (*Audited*) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan. Semua Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, **05 MAY 2025**

Inspektur



Kuhuk Agung Priyadi, S.E.

NIP. 196808171988031003



MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal *Audited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 09 MAY 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosa Perkasa Roeslani

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp8.442.627.534,00 dari estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.147.741.865.665,00 atau mencapai 93,37 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.229.295.942.000,00.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.390.207.300.749,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp28.356.435.940,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.238.134.893.484,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp123.715.971.325,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp78.257.257.658,00 dan Rp2.311.950.043.091,00.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp798.282.016,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.123.797.578.172,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(1.122.999.296.156,00).

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp3.353.411.674,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(1.119.645.884.482,00).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp2.288.895.571.531,00, dikurangi dengan Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp(1.119.645.884.482,00), ditambah dengan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp(736.047.089,00) dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp1.143.436.403.131,00 sehingga nilai Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.311.950.043.091,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	8.442.627.534	--	9.804.636.242
JUMLAH PENDAPATAN		-	8.442.627.534	--	9.804.636.242
BELANJA	B.2.				
Belanja Rupiah Murni					
Belanja Pegawai	B.3	251.203.078.000	241.176.060.270	96,01	141.917.304.417
Belanja Barang	B.4	867.300.733.000	814.685.758.812	93,93	893.828.961.599
Belanja Modal	B.5	110.792.131.000	91.880.046.583	82,93	59.205.388.245
JUMLAH BELANJA		1.229.295.942.000	1.147.741.865.665	93,37	1.094.951.654.261

Jakarta, **09 MAY 2025**

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

**Roesah Perkasa Roeslani**

N E R A C A

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	104.475.690	678.341.646
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	503.240.777	598.593.012
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	26.479.577.654	7.188.792.542
Piutang Bukan Pajak	C.4	7.090.354	20.121.514
Persediaan	C.5	1.262.051.465	1.319.069.413
Jumlah Aset Lancar		28.356.435.940	9.804.918.127
ASET TETAP			
Tanah	C.6	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000
Peralatan dan Mesin	C.7	380.253.431.212	338.922.462.087
Gedung dan Bangunan	C.8	294.993.064.951	286.973.823.275
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.9	9.022.115.183	9.022.115.183
Aset Tetap Lainnya	C.10	1.510.762.849	1.447.207.849
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(407.191.399.711)	(363.259.337.377)
Jumlah Aset Tetap		2.238.134.893.484	2.232.653.190.017
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.12	145.278.190.394	102.047.984.612
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.13	78.629.147.521	79.696.684.428
Aset Lain-lain	C.14	24.264.826.079	24.239.552.857
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(124.456.192.669)	(76.081.722.295)
Jumlah Aset Lainnya		123.715.971.325	129.902.499.602
JUMLAH ASET		2.390.207.300.749	2.372.360.607.746
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	77.075.313.679	81.012.548.924
Pendapatan Diterima di Muka	C.17	1.076.086.105	1.770.863.838
Uang Muka dari KPPN	C.18	104.475.690	678.341.646
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.19	1.382.184	3.281.807
JUMLAH KEWAJIBAN		78.257.257.658	83.465.036.215
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	2.311.950.043.091	2.288.895.571.531
JUMLAH EKUITAS		2.311.950.043.091	2.288.895.571.531
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.390.207.300.749	2.372.360.607.746

Jakarta, 09 MAY 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Rosan Perkasa Roeslani

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	798.282.016	675.091.049
JUMLAH PENDAPATAN		798.282.016	675.091.049
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	240.921.172.808	142.126.401.683
Beban Persediaan	D.3	4.402.439.685	5.083.250.300
Beban Barang dan Jasa	D.4	568.904.361.616	664.987.750.735
Beban Pemeliharaan	D.5	15.873.066.245	17.718.756.735
Beban Perjalanan Dinas	D.6	202.175.321.588	203.840.036.292
Beban Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.7	0	1.347.090
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	91.521.216.230	63.098.476.709
JUMLAH BEBAN		1.123.797.578.172	1.096.856.019.544
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.122.999.296.156)	(1.096.180.928.495)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.9		
PENDAPATAN			
		7.863.292.850	8.468.762.419
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	147.889.999
Pendapatan dari Kegiatan Non Ops Lainnya		7.863.292.850	8.320.872.420
BEBAN		4.509.881.176	19.662.460.906
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		3.841.653.213	19.662.459.303
Beban dari Kegiatan Non Ops Lainnya		668.227.963	1.603
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.353.411.674	(11.193.698.487)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.119.645.884.482)	(1.107.374.626.982)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.119.645.884.482)	(1.107.374.626.982)

Jakarta, 09 MAY 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Rosah Perkasa Roeslani

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	2.288.895.571.531	2.311.419.950.932
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.119.645.884.482)	(1.107.374.626.982)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(736.047.089)	(296.770.438)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	-	98.990.825
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.6	(316.903.265)	(433.022.763)
Koreksi Lain-lain	E.7	(419.143.824)	37.261.500
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	1.143.436.403.131	1.085.147.018.019
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		23.054.471.560	(22.524.379.401)
EKUITAS AKHIR	E.9	2.311.950.043.091	2.288.895.571.531

Jakarta, 09 MAY 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Rosari Perkasa Roeslani

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penanaman modal sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

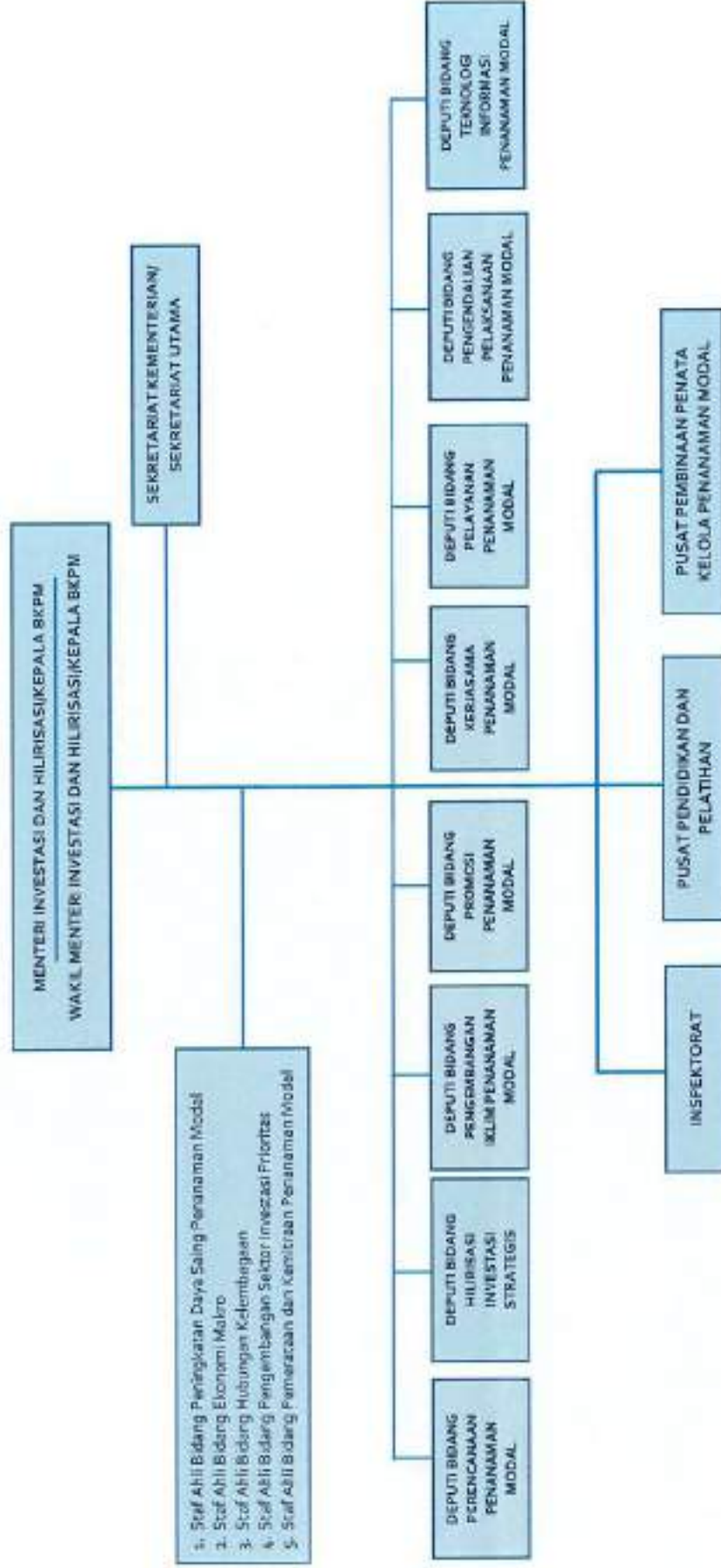
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal resmi ditetapkan sebagai Kementerian Negara dengan nama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 Tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berubah nomenklatur menjadi **Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal**.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Struktur organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan susunan kelembagaan sebagaimana dapat dilihat pada Bagan 1 sebagai berikut:

Bagan A.1.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 dimaksud, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM;
 - b. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM;
-
- Eselon I:**
- c. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;
 - d. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
 - e. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
 - f. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - g. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - h. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
 - i. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 - j. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - k. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal;
-
- Staf Ahli:**
- l. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;
 - m. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
 - n. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
 - o. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas; dan
 - p. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal;
-
- Eselon II Mandiri:**
- q. Inspektorat;
 - r. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - s. Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional maka Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menetapkan visi dan misi yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024-2029 yaitu:

VISI

Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5 (lima) dari 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam "Asta Cita" sebagai berikut:

MISI

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya penanaman modal yang berkualitas melalui peningkatan penanaman modal di sektor prioritas termasuk hilirisasi, berorientasi ekspor, dan berbasis kewilayahan untuk memperkuat transformasi ekonomi; dan

2. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memperkuat transformasi tata kelola penanaman modal.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu ***"Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri"*** sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata;
2. Terwujudnya realisasi penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam; dan
3. Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima.

TARGET SASARAN STRATEGIS

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM T.A. 2024

Seluruh pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kemudian dituangkan dalam target kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel A.1.
TARGET DAN REALISASI KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya realisasi penanaman modal				
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal - (Rp Triliun)	1.239,30	1.714,20	138,32
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder - (Rp Triliun)	646,1	721,30	111,64
3	Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa) - (%)	51,7	52,00	100,97
4	Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM - (%)	53,1	47,5	89,45
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal				
5	Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) - (Peringkat EoDB)	40	27	120
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani				
6	Nilai reformasi birokrasi BKPM - (Predikat/Nilai)	80	71,91	89,89
7	Opini atas Laporan Keuangan BKPM - (Opini BPK)	WTP	WTP	100

Pada Tahun 2021, secara resmi diumumkan pemberhentian penerbitan laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) dan adanya rencana penyusunan pendekatan baru yang dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha. Sejak tahun 2022 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia mengacu pada *World Competitiveness Yearbook 2023* yang diterbitkan Institute for Management Development (IMD). Dalam *World Competitiveness Yearbook 2023*, indeks daya saing kemudahan berusaha Indonesia mengalami peningkatan yang semula berada di peringkat ke-44 di Tahun 2022, menjadi peringkat ke-34 di Tahun 2023, serta menjadi peringkat 27 di Tahun 2024 dari total 64 negara di seluruh dunia.

Keterkaitan antara rencana strategis dengan program kerja dan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel A.2.
REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Program Kerja	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Program Penanaman Modal	1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal	721.629.726.000	668.345.108.609	92,62
2	Program Dukungan Manajemen	3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	507.666.216.000	479.396.756.976	94,43
JUMLAH			1.229.295.942.000	1.147.741.865.665	93,37

PENGELOLAAN APBN TAHUN 2024

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan entitas akuntansi yang memiliki 47 (empat puluh tujuh) Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari 9 (sembilan) Satuan Kerja Pusat dan 38 (tiga puluh delapan) Satuan Kerja Dekonsentrasi dengan rincian sebagai berikut:

SATKER PUSAT		
No	Kode Satker	Nama Satker
1	017202	Sekretariat Utama/Sekretariat Kementerian
2	650102	Deputi Bidang Hilirisasi Informasi Strategis
3	650103	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
4	664848	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
5	664852	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
6	664859	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
7	664873	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
8	664880	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9	670650	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
SATKER DEKONSENTRASI		
No	Kode Satker	Nama Satker
1	029002	DPMP TSP Provinsi Jawa Barat
2	039002	DPMP TSP Provinsi Jawa Tengah
3	049001	DPMP TSP Provinsi DIY
4	050016	DPMP TSP Provinsi Jawa Timur
5	060038	DPMP TSP Nanggroe Aceh Darussalam
6	079001	DPMP TSP Provinsi Sumatera Utara
7	080022	DPMP TSP Provinsi Sumatera Barat
8	099001	DPMP TSP Provinsi Riau
9	100098	DPMP TSP Provinsi Jambi
10	119002	DPMP TSP Provinsi Sumatera Selatan
11	120020	DPMP TSP Provinsi Lampung
12	139001	DPMP TSP Provinsi Kalimantan Barat
13	140020	DPMP TSP Provinsi Kalimantan Tengah
14	159002	DPMP TSP Provinsi Kalimantan Selatan
15	169001	DPMP TSP Provinsi Kalimantan Timur
16	170029	DPMP TSP Provinsi Sulawesi Utara
17	180015	DPMP TSP Provinsi Sulawesi Tengah
18	190099	DPMP TSP Provinsi Sulawesi Selatan
19	200028	DPMP TSP Provinsi Sulawesi Tenggara
20	210023	DPMP TSP Provinsi Maluku
21	220022	DPMP TSP Provinsi Bali
22	230024	DPMP TSP Provinsi Nusa Tenggara Barat
23	249002	DPMP TSP Provinsi Nusa Tenggara Timur
24	250024	DPMP TSP Provinsi Papua
25	260028	DPMP TSP Provinsi Bengkulu

No	Kode Satker	Nama Satker
26	280023	DPMTSP Provinsi Maluku Utara
27	290018	DPMTSP Provinsi Banten
28	300015	DPMTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
29	310090	DPMTSP Provinsi Gorontalo
30	320082	DPMTSP Provinsi Kepulauan Riau
31	330082	DPMTSP Provinsi Papua Barat
32	340096	DPMTSP Provinsi Sulawesi Barat
33	417745	DPMTSP Provinsi Kalimantan Utara
34	650101	DPMTSP Provinsi DKI Jakarta
35	690916	DPMTSP Provinsi Papua Barat Daya
36	690917	DPMTSP Provinsi Papua Selatan
37	690918	DPMTSP Provinsi Papua Tengah
38	690919	DPMTSP Provinsi Papua Pegunungan

Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM T.A 2024 merupakan Laporan Keuangan yang dihasilkan dari konsolidasi Laporan Keuangan 9 (sembilan) Satker Pusat dan 38 (tiga puluh delapan) Satker Dekonsentrasi.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Penyusunan Laporan Keuangan pada SAKTI dilakukan menggunakan modul GL dan modul pelaporan. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Barang Milik Negara.

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Basis
Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

Pendapatan -
LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

Pendapatan -
LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.3.
PENYISIHAN PIUTANG

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DKN	100%

- Penyisihan piutang tak tertagih pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak dilakukan untuk piutang belanja pegawai yang dapat dikompensasikan pembayarannya melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Nilai Persediaan disajikan sebesar Biaya Perolehan. Pada pertengahan tahun 2021 terdapat perubahan metode penilaian persediaan semula menggunakan metode Harga Pembelian Terakhir menjadi menggunakan metode *First in First out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar.

b. Aset Tetap

- Aset Tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol.

Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada Pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

C. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.4.
MASA MANFAAT ASET TETAP

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan)	4 tahun

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak

Berwujud dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.5/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.
MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan pagu anggaran Pagu Anggaran yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.229.295.942.000,00. Rincian pagu anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan sebagai berikut:

Tabel B.1.
PAGU ANGGARAN PER JENIS BELANJA TA. 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	TA. 2024	
	Pagu Awal	Pagu Perubahan
Belanja Pegawai	163.719.525.000	251.203.078.000
Belanja Barang	928.210.233.000	867.300.733.000
Belanja Modal	137.366.184.000	110.792.131.000
Jumlah	1.229.295.942.000	1.229.295.942.000

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan program kerja, rincian pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.
PAGU ANGGARAN PER PROGRAM KERJA TA. 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian Program Kerja	Pagu Awal	Pagu Perubahan
Program Dukungan Manajemen	419.063.840.000	507.666.216.000
Program Penanaman Modal	810.232.102.000	721.629.726.000
Jumlah	1.229.295.942.000	1.229.295.942.000

Pada Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa revisi anggaran yang mengubah jumlah anggaran pada level satuan kerja namun tidak merubah pagu anggaran total Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Perubahan anggaran akibat adanya perubahan target dan anggaran Prioritas Nasional serta pergeseran anggaran terkait belanja pegawai berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-216/AG/AG.3/2024 tanggal 14 Maret 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2024;
- II. Perubahan anggaran akibat realokasi dan optimalisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-291/AG/AG.3/2024 tanggal 19 April 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2024;
- III. Perubahan anggaran akibat realokasi anggaran Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-609/AG/AG.3/2024 tanggal 27 September 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2024; dan

- IV. Perubahan anggaran akibat realokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-749/AG/AG.3/2024 tanggal 5 November 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TA 2024.

Rincian perubahan alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel pada **Lampiran 1**.

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.442.627.534,00. Tidak terdapat estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Tahun Anggaran 2024.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8.1.1.
ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	8.442.627.534	--
Jumlah	0	8.442.627.534	--

Realisasi Pendapatan pada pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.442.627.534,00 seluruhnya berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	67.392.000
2	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	388.132
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35.908.470
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	140.071.514
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.198.864.424
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.994
Total		8.442.627.534

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp67.392.000,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa penerimaan pembayaran sewa ruang dari Notaris Mina Ng, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Persetujuan Sewa pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor S-97/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 17 Mei 2024.

2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp388.132,00 berasal dari pendapatan bunga rekening pemerintah yang terdiri dari:

- i. Pendapatan bunga atas Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Satker Sekretariat Utama sebesar Rp19.107,00; dan
- ii. Pendapatan bunga atas Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sebesar Rp369.025,00 dengan rincian:
 - a) Pendapatan bunga rekening IIPC Seoul senilai Rp15.818,00;
 - b) Pendapatan bunga rekening IIPC Taipei senilai Rp167.900,00;
 - c) Pendapatan bunga rekening IIPC London senilai Rp184.577,00; dan
 - d) Pendapatan bunga rekening IIPC Tokyo senilai Rp730,00.

3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp35.908.470,00 berasal dari:

- a. Satker Sekretariat Utama berupa:
 - a) Pengenaan denda atas keterlambatan pekerjaan pengadaan *loose furniture* Ruang Kerja Lantai 7 dan 8 Gedung Ismail Saleh senilai Rp19.547.484,00;
 - b) Pengenaan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan Penyelesaian Kajian Dampak Survey Kemudahan Berusaha terhadap *Arus Foreign Direct Investment* (FDI) di Negara Berkembang senilai Rp171.172,00.
 - c) Pengenaan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan Penyusunan Kajian Penguatan Organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal senilai Rp929.494,00.
 - d) Pengenaan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan Penyusunan Kajian Kebijakan Dasar Penanaman Modal dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal senilai Rp3.352.906,00.

- b. Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal berupa pengenaan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan pemutakhiran website Kementerian Investasi dan Hilirisasi senilai Rp11.907.414,00.

4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp140.071.514,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Tahun 2023 yang antara lain terdiri dari gaji dan tunjangan, honorarium tetap, dan uang makan yang baru disetorkan di Tahun 2024.

5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp8.198.864.424 00 berasal dari pengembalian belanja barang TA 2023 yang baru disetorkan di Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Satker Sekretariat Utama sebesar Rp23.601.366,00 berupa:
 - a) Pengembalian honorarium tim bulan Oktober - Desember TA. 2023 sebesar Rp2.850.000,00;
 - b) Pengembalian sisa Dana Operasional Menteri (DOM) TA. 2023 sebesar Rp35.483,00;
 - c) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp860.000,00; dan
 - d) Pengembalian kelebihan biaya langsung non personil pada PT Sinergi Visi Utama sebesar Rp19.855.883,00.
- b. Satker Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis sebesar Rp3.470.000,00 yang seluruhnya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran Kegiatan Diseminasi Publik Peta Jalan (*Roadmap*) Hilirisasi Investasi Strategis TA 2023;
- c. Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sebesar Rp1.103.848.879,00 berupa:
 - a) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas TA. 2023 sebesar Rp980.000,00;
 - b) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Kegiatan Analisis *Market Intelligence* Negara dan Sektor Prioritas Promosi TA. 2023 sebesar Rp2.349.835,00;

- c) Pengembalian kelebihan pembayaran barang berupa Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri TA. 2023 sebesar Rp1.059.950.000,00;
- d) Penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas Kontrak Nomor 12/SP/PPK-DPPM/ALJAZEERA/VII/2023 untuk Kegiatan Penayangan Promosi Investasi di Media Elektronik Al-Jazeera sebesar Rp17.886.993,00; dan
- e) Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor 13/SP/PPK-DPPM/ANALISIS-NTNP/VII/2023 untuk Kegiatan Analisis Negara Target dan Negara Pesaing sebesar Rp22.682.051,00.
- d. Satker Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp264.199.099,00 seluruhnya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran atas Kegiatan Pemberian NIB kepada Pelaku Usaha UMK TA. 2023.
- e. Satker Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp402.102.131,00 berupa:
 - a) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp205.168.110,00;
 - b) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM TA. 2023 sebesar Rp6.842.894,00;
 - c) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Eksekusi Realisasi Investasi Proyek Terkendala Wilayah Timur TA. 2023 sebesar Rp9.437.321,00;
 - d) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Satuan Tugas Percepatan Investasi TA. 2023 sebesar Rp8.837.029,00;
 - e) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Eksekusi Realisasi Investasi Proyek terkendala Wilayah Barat TA. 2023 sebesar Rp10.583.704,00; dan
 - f) Pengembalian kelebihan pembayaran dari PT. Destinasi Asia Indonesia atas kegiatan terkait Dana Alokasi Khusus sebesar Rp161.233.073,00.
- f. Satker Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebesar Rp3.219.304.715,00 dengan rincian:
 - a) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp24.597.207,00;

- b) Pengembalian kelebihan belanja non personil Kegiatan Penyusunan Peta Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara TA. 2023 sebesar Rp550.067.876,00; dan
- c) Pengembalian kelebihan pembayaran belanja personil Peta Peluang Investasi TA. 2023 sebesar Rp2.644.639.632,00.
- g. Satker Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal sebesar Rp3.181.372.934,00 berupa:
 - a) Pengembalian kelebihan belanja atas kegiatan Pengadaan Platform Komputasi Awan Infrastruktur Pendukung OSS TA. 2023 sebesar Rp2.857.366.154,00; dan
 - b) Penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas Kontrak Nomor 02/SP/PPK-DTIPM/CLOUD-OSS/IX/2023 untuk Pengadaan Penyediaan Platform Komputasi Awan Sebagai Infrastruktur Pendukung OSS TA 2023 sebesar Rp324.006.780,00.
- h. Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp965.300,00 seluruhnya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas.

6. Pendapatan Anggaran Lain-lain

Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp2.994,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa penerimaan atas kelebihan transfer Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Honorarium Tetap Bulan Desember 2023 a.n. Eka Sastra sesuai Nota Dinas Nomor 95/B.3/A.3/2024.

Rincian Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 bila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 12,13 persen.

Tabel B.1.2.
PERRANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TA 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	0	147.889.999	(100,00)
Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung, dan Bangunan	67.392.000	1.229.665.000	(94,52)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	388.132	255.823	51,72
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35.908.470	1.919.354	1.770,86
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	140.071.514	136.028.859	2,97
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	8.198.864.424	8.053.887.991	1,80
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	34.585.897	(100)
Pendapatan Lain-lain	2.994	4.277.513	(99,93)
Jumlah	8.442.627.534	9.608.510.436	(12,13)

Penurunan pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 sebagian besar berasal dari penurunan nilai Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL, dan Penerimaan Kembali belanja Modal TAYL.

B.2 Belanja

Belanja Rupiah Murni

Realisasi
Belanja
Negara

Realisasi Belanja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.147.741.378.665,00 atau mencapai 93,37 persen dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp1.229.295.942.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

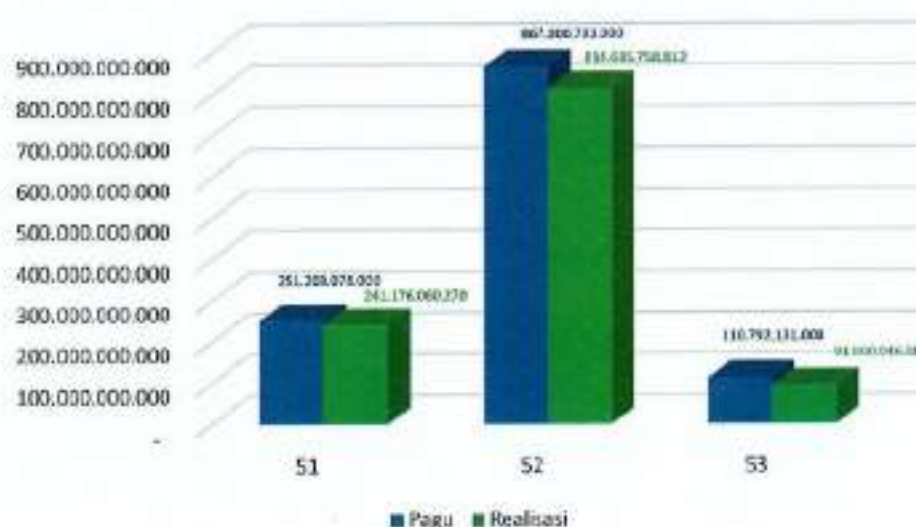
Tabel B.2.1.
PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA T.A. 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	251.203.078.000	241.376.060.270	95,01
Belanja Barang	867.300.733.000	814.685.758.812	93,93
Belanja Modal	110.792.131.000	91.880.046.583	82,93
Jumlah	1.229.295.942.000	1.147.741.865.665	93,37

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik B.2.1.
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PADA T.A. 2024
(dalam Rupiah)



B.3 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp241.176.060.270,00 dan Rp141.917.304.417,00. Realisasi belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 69,94 persen dari realisasi belanja pegawai di periode yang sama pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel B.3.1.
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PEGAWAI T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	80.426.314.461	78.476.832.021	2,48
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	186.900.170	0	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.110.741.400	2.098.787.500	(47,08)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.080.172.770	0	0,00
Belanja Honorarium	7.579.961.747	6.337.872.110	19,60
Belanja Lembur	73.633.000	67.402.000	9,24
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	151.338.553.231	55.991.045.582	170,29
Jumlah Belanja Kotor	241.796.276.779	142.971.939.193	69,12
Pengembalian Belanja	620.216.509	1.054.634.776	(41,19)
Jumlah	241.176.060.270	141.917.304.417	69,94

Peningkatan realisasi belanja pegawai antara lain berasal dari peningkatan belanja untuk pembayaran Tunjangan Khusus yang baru dibayarkan pada TA. 2024, pembayaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat di TA. 2024, dan belanja honorarium untuk kelompok ahli Menteri Investasi/BKPM. Rincian Pengembalian Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel B.3.2.
RINCIAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI T.A. 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	80.426.314.461	565.815.479	79.860.498.982
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	186.900.170	0	186.900.170
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.110.741.400	0	1.110.741.400
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.080.172.770	0	1.080.172.770
Belanja Honorarium	7.579.961.747	24.920.442	7.555.041.305
Belanja Lembur	73.633.000	0	73.633.000
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	151.338.553.231	29.480.588	151.309.072.643
Jumlah	241.796.276.779	620.216.509	241.176.060.270

B.4 Belanja Barang

Belanja
Barang

Realisasi Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp814.685.758.812,00 dan Rp893.828.961.599,00. Realisasi Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 8,85 persen dari Realisasi Belanja Barang pada periode yang sama di Tahun Anggaran 2023. Penurunan belanja barang signifikan terjadi pada akun Belanja Perjalanan Luar Negeri dan Belanja Jasa.

Tabel B.4.1.
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA BARANG T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Belanja Barang Operasional	45.642.387.074	44.173.588.075	3,33
Belanja Barang Non Operasional	55.860.771.011	61.458.072.833	(9,11)
Belanja Barang Persediaan	4.769.954.118	4.758.204.909	0,25
Belanja Jasa	490.881.255.437	562.401.856.586	(12,72)
Belanja Pemeliharaan	15.873.066.245	17.611.865.143	(9,87)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	134.414.605.085	121.942.909.567	10,23
Belanja Perjalanan Luar Negeri	67.855.088.759	82.142.216.482	(17,39)
Jumlah Belanja Kotor	815.297.127.729	894.488.713.595	(8,85)
Pengembalian Belanja	611.368.917	659.751.996	(7,33)
Jumlah	814.685.758.812	893.828.961.599	(8,85)

Rincian Pengembalian Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel B.4.2.
RINCIAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA BARANG T.A. 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto
Belanja Barang Operasional	45.642.387.074	37.784.569	45.604.602.505
Belanja Barang Non Operasional	55.860.771.011	33.293.750	55.827.477.261
Belanja Barang Persediaan	4.769.954.118	-	4.769.954.118
Belanja Jasa	490.881.255.437	445.918.342	490.435.337.095
Belanja Pemeliharaan	15.873.066.245	-	15.873.066.245
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	134.414.605.085	64.328.937	134.350.276.148
Belanja Perjalanan Luar Negeri	67.855.088.759	30.043.319	67.825.045.440
Jumlah	815.297.127.729	611.368.917	814.685.758.812

Belanja
Modal**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp91.880.046.583,00 dan Rp59.205.388.245,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 55,19 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Lainnya secara signifikan.

Tabel B.5.1.
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.612.284.125	23.574.902.084	72,27
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.019.241.676	7.891.440.961	1,62
Belanja Modal Lainnya	43.248.520.782	27.739.045.200	55,91
Jumlah Belanja Kotor	91.880.046.583	59.205.388.245	55,19
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	91.880.046.583	59.205.388.245	55,19

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp40.612.284.125,00 dan Rp23.574.902.084,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar 72,27 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel B.5.1.1.
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.612.284.125	23.574.902.084	72,27
Jumlah	40.612.284.125	23.574.902.084	72,27

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.019.241.676,00 dan Rp7.891.440.961,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,62 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel B.5.2.
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.019.241.676	7.891.440.961	1,62
Jumlah	8.019.241.676	7.891.440.961	1,62

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp43.248.520.782,00 dan Rp27.739.045.200,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 55,91 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel B.5.3.
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL LAINNYA
T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Lainnya	43.248.520.782	27.739.045.200	55,91
Jumlah	43.248.520.782	27.739.045.200	55,91

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp104.475.690,00 dan Rp678.341.646,00.

Tabel C.1.1
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	104.475.690	678.341.646
Jumlah	104.475.690	678.341.646

Sisa Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 seluruhnya berbentuk uang tunai dan telah disetorkan ke kas negara pada awal bulan Januari 2025. Rincian penyetoran saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satuan Kerja disajikan sebagai berikut:

Tabel C.1.2
RINCIAN PENYETORAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

(Dalam Rupiah)

No	SATUAN KERJA	NTPN ¹⁾	TANGGAL	JUMLAH
1	Deputi Kerjasama PM	57A56522CJVL8MIK	09-Jan-25	870.000
		C88BAGQTC94E2MJM	09-Jan-25	2.035.690
2	Deputi Perencanaan PM	5E86B7NAS3PGAVCS	17-Jan-25	1.570.000
		2A59F6QTC98A2SS7	21-Jan-25	100.000.000
Total				104.475.690

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp503.240.777,00 dan Rp598.593.012,00.

Kas Lainnya
dan Setara
Kas

Tabel C.2.1
KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Kas Lainnya dan Setara Kas	503.240.777	598.593.012
Jumlah	503.240.777	598.593.012

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.2.2
DAFTAR RINCIAN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	31 DES 2024	31 DES 2023
1	Sekretariat Utama	501.845.511	595.108.048
2	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	13.082	203.157
3	DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur	1.382.184	3.281.807
	Jumlah	503.240.777	598.593.012

Rincian penjelasan saldo Kas Lainnya dan Setara kas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp501.845.511,00 pada Satker Sekretariat Utama merupakan saldo yang masih ada pada Rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 yang berasal dari pencairan honorarium tetap bulan Desember 2024 yang belum diserahkan kepada pegawai. Atas saldo ini seluruhnya telah diselesaikan di Bulan Januari 2025.
- Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp13.082,00 pada Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal berasal dari Jasa Giro rekening milik Kantor IIPC Seoul yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.
- Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp1.382.184,00 pada Satker DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur berasal dari Utang Pajak Bendahara pengeluaran yang sudah disetorkan ke kas negara pada bulan November Tahun 2024 namun

terdapat kesalahan kode penyetoran akun pajak yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses perbaikan.

Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM disajikan pada **Lampiran 2** Laporan Keuangan ini.

Belanja
Dibayar
Dimuka

C.3 Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp26.479.577.654,00 dan Rp7.188.792.542,00.

Tabel C.3.1
BELANJA DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Belanja Dibayar Di muka (<i>Prepaid</i>)	26.479.577.654	7.188.792.542
Jumlah	26.479.577.654	7.188.792.542

Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*) merupakan pengeluaran Satuan Kerja/Pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati Satuan Kerja/Pemerintah. Saldo Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*) Per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

Tabel C.3.2
RINCIAN BELANJA DIBAYAR DIMUKA MENURUT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	NILAI	
	31 DES 2024	31 DES 2023
Satker Sekretariat Utama	235.219.791	68.013.644
1. Perpanjangan IP Publik (2x254) dan domain (bkpm.go.id, oss.go.id, investindonesia.go.id)	-	3.906.690
2. Potongan Presensi Pegawai Bulan Desember	31.327.286	64.106.954
3. Lisensi Zoom	8.796.162	-
5. Lisensi Canva	1.865.110	-
6. Langganan (<i>membership</i>) Hukum Online	193.231.233	-
Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi PM	19.959.575.063	7.120.778.898
1. Lisensi Annual Technical Support (ATS)	1.344.297.027	1.552.177.775
2. Lisensi Business Intelligence	1.509.622.813	968.771.467
3. Lisensi Office 365	460.494.506	419.208.972
4. Lisensi Software Microservices	2.210.747.253	2.346.587.059

URAIAN	NILAI	
	31 DES 2024	31 DES 2023
5. Lisensi Application Monitoring System	1.803.743.901	1.834.032.625
6. Lisensi Threat Intelligence and Darkweb Monitoring Cycle	10.849.305.560	-
7. Lisensi Endpoint Security	1.398.749.725	-
8. Lisensi Vulnerability Assessment Tool	172.211.538	-
9. Lisensi Security Testing Tool	210.402.740	-
Satker Deputi Bidang Promosi PM	6.273.075.833	-
1. Lisensi Zoom	13.098.343	-
2. Lisensi Aplikasi pada Kantor IIPC	21.684.976	-
3. Biaya Bantuan Pendidikan Anak (BBPA) pada IIPC Abu Dhabi	274.925.499	-
4. Biaya Sewa untuk World Economic Forum (WEF) - Davos	5.963.367.015	-
Satker Deputi Bidang Pelayanan PM	11.706.967	-
1. Lisensi Zoom	11.706.967	-
Jumlah	26.479.577.654	7.188.792.542

Piutang
Bukan Pajak

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.090.354,00 dan Rp20.121.514,00.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Tabel C.4.1
PIUTANG BUKAN PAJAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Piutang Bukan Pajak	7.090.354	20.121.514
Jumlah	7.090.354	20.121.514

Perbandingan rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31-12-2024	31-12-2023
1	Tri Hesti Septari S. Sos.	-	630.000
2	Parihutan Marlin Yosep S.E.	1.106.444	1.106.444
3	Sopyan	1.263.800	1.263.860
4	Usamah Widiatmoko	2.118.550	4.556.800
5	Andi Muhammad Faiz Adani Adnan, S.P.	-	2.603.000
6	Nurman Hidayat, S.T.	-	9.961.410

No	Uraian	31-12-2024	31-12-2023
7	Pungky Arifiandoko	1.301.500	-
8	Husen Maulana	1.300.000	-
Jumlah		7.090.354	20.121.514

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa kelebihan pembayaran belanja pegawai.

C.5 Persediaan

Persediaan: Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.262.051.465,00 dan Rp1.319.069.413,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel C.5.1
PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Persediaan	1.262.051.465	1.319.069.413
Jumlah	1.262.051.465	1.319.069.413

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 seluruhnya merupakan Barang Konsumsi dengan rincian mutasi pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	1.319.069.413
Mutasi tambah:	4.769.954.118
Pembelian	4.769.954.118
Mutasi kurang:	4.826.972.066
Pemakaian Persediaan Konsumsi	4.402.439.585
Pemakaian Persediaan Rusak/Usang	424.532.381
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	1.262.051.465

Mutasi Tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp4.769.954.118,00 berasal dari:

- Pembelian persediaan menggunakan akun 521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi) sebesar Rp4.296.571.419,00, merupakan pembelian persediaan berupa alat tulis kantor dan alat listrik lainnya; dan

- Pembelian persediaan menggunakan akun 521832 (Belanja Barang Persediaan Lainnya) sebesar Rp473.382.699,00, merupakan pembelian persediaan berupa obat-obatan.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp4.826.972.066,00 berasal dari:

- Pemakaian Barang konsumsi berupa alat tulis kantor, alat listrik lainnya, dan Obat-obatan sebesar Rp4.402.439.685,00; dan
- Pencatatan persediaan usang sebesar Rp424.532.381,00 akibat perubahan nomenklatur Kementerian Investasi/BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sehingga atas persediaan yang antara lain berupa amplop, map, dan kop surat dengan nomenklatur lama menjadi tidak dapat digunakan lagi.

Persediaan senilai Rp1.262.051.465,00 pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian persediaan per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 3** Laporan Keuangan ini.

C.6 Tanah

Tanah

Tanah yang dimiliki Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama sebesar Rp1.959.546.919.000,00.

Tabel C.6.
TANAH PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Tanah	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000
Jumlah	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000

Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Luas Tanah	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	398 m ²	2.717.574.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	18.496 m ²	1.944.165.424.000
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	9.202 m ²	12.663.921.000
	Total	28.096 m²	1.959.546.919.000

Terdapat koreksi luas tanah pada periode tahun 2024 dalam modul Aset Tetap Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk menyesuaikan antara luas tanah yang tercatat dalam aplikasi SAKTI dengan luas tanah sesuai sertifikat kepemilikan. Luas Tanah yang tercatat semula sebesar 28.348 m² dilakukan koreksi

kuantitas berkurang sebesar 252 m² sehingga luas tanah menjadi sebesar 28.096 m². Atas koreksi dimaksud tidak mengakibatkan perubahan nilai tanah dalam rupiah. Rincian koreksi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	NUP	Luas Tanah pada Sertipikat	Luas Tanah pada Aplikasi SAKTI	Selisih Nilai Koreksi
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1	236 m ²	242 m ²	(6 m ²)
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2	162 m ²	162 m ²	-
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	18.496 m ²	18.742 m ²	(246 m ²)
4	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1	9.202 m ²	9.202 m ²	-
Total			28.096 m²	28.348 m²	(252 m²)

Dalam Laporan Barang Milik Negara per 31 Desember 2024 masih terdapat kesalahan pencatatan kodefikasi aset berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III seluas 398 m² yang seharusnya dicatat sebagai Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II. Atas kesalahan pencatatan ini akan dilakukan koreksi kodefikasi aset tanah pada periode tahun 2025 tanpa merubah luas dan nilai aset tanah.

Sertipikat Tanah dan bangunan sebagai bukti kepemilikan atas aset tanah seluruhnya dikuasai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Terdapat Sertifikat Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan pada NUP 1 yang masih berstatus Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan saat ini sedang dalam proses perubahan ke Sertipikat Hak Pakai (SHP). Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus memantau proses pengalihan sertifikat ini.

Selanjutnya, sampai dengan posisi per 31 Desember 2024, terdapat sebagian aset tanah negara golongan II dan gedung bangunan rumah negara golongan II, yang berlokasi di Jalan Bima Raya Nomor 120 Depok sesuai Sertipikat Nomor 150, masih digunakan oleh pensiunan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM a.n. Bapak Said Ridwan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Luas	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	Tanah Negara Gol II	162 m ²	1.120.416.000	1.120.416.000
2	Bangunan Negara Gol II	50 m ²	99.824.000	59.270.000
Jumlah			1.220.240.000	1.179.686.000

Peralatan
dan Mesin**C.7 Peralatan dan Mesin**

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp380.253.431.212,00 dan Rp338.922.462.087,00.

Tabel C.7
PERALATAN DAN MESIN PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Peralatan dan Mesin	380.253.431.212	338.922.462.087
Jumlah	380.253.431.212	338.922.462.087

Terdapat mutasi nilai peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	338.922.462.087
Mutasi tambah:	45.526.990.145
1. Pembelian Barang Modal	40.612.284.125
2. Hibah Masuk	4.137.165.000
3. Penilaian Kembali (Revaluasi)	718.685.000
4. Reklasifikasi Masuk	58.856.020
Mutasi kurang:	4.196.021.020
1. Hibah Keluar	4.137.165.000
2. Reklasifikasi Keluar	58.856.020
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	380.253.431.212
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	310.059.459.543
Nilai Buku per 31 Desember 2024	70.193.971.669

Mutasi tambah:

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.526.990.145,00 terdiri dari:

1. Pembelian Peralatan dan Mesin menggunakan akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) sebesar Rp40.612.284.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Sekretariat Utama	22.065.026.125
Pengadaan Chiller dan AC	4.457.405.000
Pengadaan Peralatan Pengolah Data (Laptop, PC, Printer, Smartboard)	5.922.629.500

Uraian	Nilai
Pengadaan Furniture (Meja, Kursi, Sofa, Lemari)	7.445.334.380
Pengadaan Peralatan Kampus Investasi (TV, Water Heater, Mesin Cuci, Setrika)	927.217.950
Pengadaan Peralatan Kampus Investasi (CCTV, TV, Penghancur Kertas)	3.312.439.295
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	18.547.258.000
Pengadaan Perangkat Keamanan Teknologi Informasi TA. 2024	5.880.000.000
Pengadaan Perangkat Jaringan Teknologi Informasi TA. 2024	1.580.000.000
Pengadaan Perangkat Jaringan TA. 2024	2.254.000.000
Pengadaan Revitalisasi Perangkat Data Center dan Command Center TA. 2024	5.067.258.000
Pengadaan Perangkat Keamanan Jaringan TA. 2024	3.766.000.000
Jumlah	40.612.284.125

2. Penerimaan Hibah Langsung Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.137.165.000,00 berupa 3 (tiga) unit Bus Listrik dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai menuju *Green Transportation* berdasarkan:
 - i) Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Nomor S-30/PR.8/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penerbitan Register Nomor 2M3BS2DA. Hibah langsung berupa Tiga (tiga) unit Bus Listrik dari *Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd* kepada Satker Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
 - ii) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 01/SP3HLBJS/A.3/B.3/2024 tanggal 18 Januari 2024; dan
 - iii) Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 814877515884328195 tanggal 23 Januari 2024.
3. Penambahan nilai sebesar Rp718.685.000,00 berasal dari hasil Penilaian Kembali Peralatan dan Mesin yang berlokasi di Kampus Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-3376/KNL.0701/2024 tanggal 28 November 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian BMN pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Berdasarkan surat dimaksud penilaian dilakukan atas 431 (empat ratus tiga puluh satu) unit Peralatan Mesin

dengan hasil penilaian sebesar Rp786.319.000,00 dengan rincian pencatatan sebagai berikut:

Jenis Aset	Jenis Laporan BMN	Jumlah	Nilai
Peralatan dan Mesin	Intrakomptable	282	718.685.000
Peralatan dan Mesin	Ekstrakomptable	110	22.394.000
Aset Tetap Lainnya	Intrakomptable	39	45.240.000
		431	786.319.000

Penilaian kembali peralatan dan mesin berupa barang intrakomptable sebesar Rp718.685.000,00 antara lain terdiri dari meja, sofa, tempat tidur, dan water heater.

4. Reklasifikasi masuk sebesar Rp58.856.020,00 berasal dari koreksi pencatatan akibat kesalahan penggunaan kodefikasi barang pada saat pencatatan pembelian. Atas kesalahan tersebut dilakukan koreksi dengan melakukan reklasifikasi keluar atas barang dengan kodefikasi yang salah, kemudian dicatat kembali melalui reklasifikasi masuk pada kodefikasi barang yang sudah sesuai. Rincian koreksi akibat kesalahan kodefikasi diatas adalah sebagai berikut:
 - i) Koreksi pencatatan Meja Kerja Besi dengan NUP 108 dan 109 menjadi Meja Kerja Kayu dengan NUP 1791 dan 1792 dengan nilai sebesar Rp15.220.320,00.
 - ii) Koreksi pencatatan Meja Kerja Besi dengan NUP 110 sampai dengan 115 menjadi Meja Kerja Kayu dengan NUP 1793 sampai dengan 1798 dengan nilai sebesar Rp40.259.700,00.
 - iii) Koreksi pencatatan Meja Kerja Kayu dengan NUP 1839 menjadi Lemari Kayu dengan NUP 339 dengan nilai sebesar Rp3.376.000,00.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.196.021.020,00 berasal dari:

1. Hibah Keluar pada Satker Sekretariat Utama berupa 3 (tiga) Unit Bus Listrik yang diserahkan kepada Universitas Gajah Mada (UGM) berdasarkan:
 - i) Surat Menteri Keuangan Nomor S-87/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 24 April 2024 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Investasi/BKPM;
 - ii) Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kepada Universitas Gajah Mada Nomor 001/BAST-BUS-UGM/KEMENINVES/2024 tanggal 30 Desember 2024; dan

- iii) Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 402 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupa 3 (tiga) unit Bus Listrik.

Atas Bus Listrik dengan nilai perolehan sebesar Rp4.137.165.000,00 telah dilakukan penyusutan sebesar Rp265.511.787,00,00 sehingga nilai buku aset menjadi sebesar Rp3.871.653.213,00.

2. Reklasifikasi keluar sebesar Rp58.856.020,00 berasal dari koreksi pencatatan akibat kesalahan penggunaan kodefikasi barang pada saat pencatatan pembelian. Atas kesalahan tersebut dilakukan koreksi dengan melakukan reklasifikasi keluar atas barang dengan kodefikasi yang salah, kemudian dicatat kembali melalui reklasifikasi masuk pada kodefikasi barang yang sudah sesuai. Rincian koreksi akibat kesalahan kodefikasi diatas adalah sebagai berikut:
- Koreksi pencatatan Meja Kerja Besi dengan NUP 108 dan 109 menjadi Meja Kerja Kayu dengan NUP 1791 dan 1792 dengan nilai sebesar Rp15.220.320,00.
 - Koreksi pencatatan Meja Kerja Besi dengan NUP 110 sampai dengan 115 menjadi Meja Kerja Kayu dengan NUP 1793 sampai dengan 1798 dengan nilai sebesar Rp40.259.700,00.
 - Koreksi pencatatan Meja Kerja Kayu dengan NUP 1839 menjadi Lemari Kayu dengan NUP 339 dengan nilai sebesar Rp3.376.000,00.

Selain mutasi aset sebagaimana dijelaskan diatas terdapat pula mutasi atas barang ekstrakomptable dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	33.104.099
Mutasi tambah:	51.464.000
1. Penilaian Kembali (Revaluasi)	22.394.000
2. Pembelian barang ekstrakomptable	29.070.000
Mutasi kurang:	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	84.568.099
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	57.660.949
Nilai Buku per 31 Desember 2024	26.907.150

Mutasi tambah sebesar Rp51.464.000,00 terdiri dari:

- Hasil penilaian kembali atas barang ekstrakomptable sebesar Rp22.394.000,00 yang antara lain berupa meja kayu, kursi kayu, cermin, dan nakas.

Penilaian Kembali Peralatan dan Mesin dilaksanakan atas BMN yang berada di Kampus Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-3376/KNL.0701/2024 tanggal 28 November 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian BMN pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

2. Pembelian barang ekstrakomptable menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptable) sebesar Rp29.070.000,00 berupa pembelian partisi sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan NUP 254 sampai dengan 283.

Barang ekstrakomptable tidak tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2024 karena memiliki nilai satuan dibawah nilai kapitalisasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00, atas barang ekstrakomptable sebagaimana dimaksud dicatat secara terpisah dalam Laporan Barang Milik Negara Ekstrakomptable.

Pada tahun 2024 terdapat aset Peralatan dan Mesin milik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dititipkan kepada Pihak Lain berupa 4 (empat) unit Bus Listrik dengan NUP 2, 3, 4, dan 6 Merek Foxtron senilai Rp21.834.400.000,00. Bus dimaksud dititipkan pada pool bis milik PT. Energi Makmur Buana di Jl. Perintis Kemerdekaan DKI Jakarta.

Rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan Akumulasi penyusutannya disajikan pada **Lampiran 4** Laporan Keuangan ini.

C.8 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp294.993.064.951,00 dan Rp286.973.823.275,00.

Tabel C.8.1
GEDUNG DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Gedung dan Bangunan	294.993.064.951	286.973.823.275
Jumlah	294.993.064.951	286.973.823.275

Terdapat mutasi nilai gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	286.973.823.275
Mutasi tambah:	9.929.935.231
1. Pembelian/Renovasi	8.019.241.676
2. Koreksi pencatatan nilai bertambah	1.910.693.555
Mutasi Kurang:	1.910.693.555
Koreksi pencatatan nilai berkurang	1.910.693.555
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	294.993.064.951
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	91.641.971.952
Nilai Buku per 31 Desember 2024	203.351.092.999

Mutasi tambah:

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.929.935.231,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan renovasi atas gedung dan bangunan menggunakan akun 533121 (Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan) sebesar Rp8.019.241.676,00 terdiri dari:
 - i) Renovasi pada Gedung Barli Halim Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp2.282.079.345,00 antara lain berasal dari pekerjaan renovasi ruang kerja Direktorat Sistem Layanan Informasi dan Jaringan (SLEIJ) dan Data Informasi, renovasi ruang kerja Auditor lantai 6, renovasi toilet lantai 6, dan renovasi ruang kerja pejabat penghubung lantai 6;
 - ii) Renovasi pada Gedung Ismail Saleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp4.567.666.974,00 antara lain berasal dari pekerjaan renovasi ruang kerja Kedeputan Bidang Hilirisasi Investasi Strategis lantai 4, renovasi ruang kerja Inspektorat lantai 5, renovasi ruang kerja Direktorat Wilayah I lantai 6, renovasi ruang kerja Deputi Teknologi Informasi lantai 3, dan renovasi toilet lantai 4 dan 6;
 - iii) Renovasi pada Gedung Suhartoyo Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp974.594.563,00 antara lain berasal dari renovasi ruang sementara Deputi Teknologi Informasi dan renovasi toilet lantai 3 dan 8; dan

- iv) Renovasi Gedung Parkir Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp194.900.794,00 berasal dari renovasi toilet rooftop gedung parkir.
- 2. Koreksi pencatatan nilai bertambah sebesar Rp1.910.693.555,00 merupakan koreksi pencatatan akibat kesalahan penginputan rincian aset dalam Aplikasi SAKTI. Koreksi dilaksanakan dengan melakukan koreksi nilai berkurang atas rincian aset yang salah diinput kemudian dicatat kembali menggunakan koreksi nilai bertambah pada kode/rincian yang sesuai. Rincian koreksi adalah sebagai berikut:
 - i) Koreksi atas asrama permanen yang semula dicatat dalam 1 NUP dengan dikoreksi menjadi 21 NUP dengan nilai koreksi sebesar Rp1.715.792.761,00. Koreksi ini merupakan tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan BPK R.I tahun 2023.
 - ii) Koreksi atas pencatatan renovasi toilet rooftop gedung parkir yang semula dicatat pada gedung bangunan kantor menjadi dicatat sebagai gedung parkir senilai Rp194.900.794,00.

Mutasi Kurang sebesar Rp1.910.693.555,00 merupakan koreksi koreksi pencatatan akibat kesalahan penginputan rincian aset dalam Aplikasi SAKTI. Koreksi dilaksanakan dengan melakukan koreksi nilai berkurang atas rincian aset yang salah diinput kemudian dicatat kembali menggunakan koreksi nilai bertambah pada kode/rincian yang sesuai. Rincian koreksi adalah sebagai berikut:

- i) Koreksi atas asrama permanen yang semula dicatat dalam 1 NUP dengan dikoreksi menjadi 21 NUP dengan nilai koreksi sebesar Rp1.715.792.761,00. Koreksi ini merupakan tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan BPK R.I tahun 2023.
- ii) Koreksi atas pencatatan renovasi toilet rooftop gedung parkir yang semula dicatat pada gedung bangunan kantor menjadi dicatat sebagai gedung parkir senilai Rp194.900.794,00.

Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada **Lampiran 4** Laporan Keuangan ini.

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi,
dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama masing-masing sebesar Rp9.022.115.183,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode Tahun Anggaran 2024.

Tabel C.9.1
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.022.115.183	9.022.115.183
Jumlah	9.022.115.183	9.022.115.183

Rincian nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	QTY	Nilai
1	Jalan	6.211 m ²	1.908.177.000
2	Irigasi	12 Unit	2.250.774.000
3	Jaringan	7 Unit	4.863.164.183
	Total		9.022.115.183

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada **Lampiran 4** Laporan Keuangan ini.

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.510.762.849,00 dan Rp1.447.207.849,00.

Tabel C.10.1
ASET TETAP LAINNYA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Aset Tetap Lainnya	1.510.762.849	1.447.207.849
Jumlah	1.510.762.849	1.447.207.849

Terdapat mutasi Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	1.447.207.849
Mutasi tambah:	63.555.000
1. Pembelian	18.315.000

Uraian	Jumlah
2. Penilaian kembali	45.240.000
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	1.510.762.849
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	641.264.175
Nilai Buku per 31 Desember 2024	869.498.674

Mutasi tambah sebesar Rp63.555.000,00, seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama yang terdiri dari:

1. Pembelian Lukisan senilai Rp18.315.000,00; dan
2. Penambahan nilai sebesar Rp45.240.000,00 berasal dari hasil Penilaian Kembali Peralatan dan Mesin yang berlokasi di Kampus Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-3376/KNL.0701/2024 tanggal 28 November 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian BMN pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Berdasarkan surat dimaksud penilaian dilakukan atas 431 (empat ratus tiga puluh satu) unit Peralatan Mesin dengan hasil penilaian sebesar Rp786.319.000,00 dengan rincian pencatatan sebagai berikut:

Jenis		Jumlah	Nilai
Peralatan dan Mesin	Intrakomptable	282	718.685.000
Peralatan dan Mesin	Ekstrakomptable	110	22.394.000
Aset Tetap Lainnya		39	45.240.000
Total		431	786.319.000,00

Hasil penilaian kembali atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp45.240.000,00 seluruhnya berupa Lukisan.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada **Lampiran 4** Laporan Keuangan ini.

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(407.191.399.711,00) dan Rp(363.259.337.377,00).

Tabel C.11.
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(407.191.399.711)	(363.259.337.377)
Jumlah	(407.191.399.711)	(363.259.337.377)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.959.546.919.000	-	1.959.546.919.000
Peralatan dan Mesin	380.253.431.212	(310.059.459.543)	70.193.971.669
Gedung dan Bangunan	294.993.064.951	(91.641.971.952)	203.351.092.999
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.022.115.183	(4.848.704.041)	4.173.411.142
Aset Tetap Lainnya	1.510.762.849	(641.264.175)	869.498.674
Jumlah	2.645.326.293.195	(407.191.399.711)	2.238.134.893.484

Selanjutnya Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Beban Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Saldo
Peralatan dan Mesin	280.952.004.790	28.684.281.540	423.173.213	310.059.459.543
Gedung dan Bangunan	77.114.874.851	14.210.193.836	316.903.265	91.641.971.952
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.648.309.186	200.354.855	-	4.848.704.041
Aset Tetap Lainnya	544.148.550	51.875.625	45.240.000	641.264.175
Jumlah	363.259.337.377	43.146.745.856	785.316.478	407.191.399.711

Terdapat koreksi nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp785.316.478,00 yang seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama yang disebabkan oleh:

1. Koreksi nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp423.173.213,00 berasal dari koreksi pencatatan nilai bertambah atas hasil

- penilaian kembali sebesar Rp718.685.000,00 dan koreksi pencatatan nilai berkurang atas hibah peralatan dan mesin berupa 3 (tiga) unit bus listrik sebesar Rp(295.511.787,00);
2. Koreksi nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp316.903.265,00 berasal dari:
 - a. Pencatatan koreksi atas pekerjaan Renovasi Toilet Rooftop Gedung Parkir Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang semula dicatat pada Gedung Kantor Permanen NUP 1 dikoreksi menjadi Bangunan Parkir Tertutup Permanen NUP 1; dan
 - b. Pencatatan koreksi atas pemisahan NUP untuk Aset berupa Asrama Permanen pada Kampus Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang semula dicatat dalam 1 NUP dikoreksi menjadi 20 NUP.
 3. Koreksi nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp45.240.000,00 seluruhnya berasal dari koreksi pencatatan nilai bertambah atas hasil penilaian kembali.

C.12 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Per Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp145.278.190.394,00 dan Rp102.047.984.612,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel C.12.
ASET TAK BERWUJUD PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Aset Tak Berwujud	145.278.190.394	102.047.984.612
Jumlah	145.278.190.394	102.047.984.612

Terdapat mutasi Aset Tak Berwujud pada Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	102.047.984.612
Mutasi tambah:	43.230.205.782

Uraian	Jumlah
Pembelian	43.230.205.782
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	145.278.190.394
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	106.685.130.305
Nilai Buku per 31 Desember 2024	38.593.060.089

Mutasi tambah sebesar Rp43.230.205.782,00 seluruhnya berasal dari pembelian dan pengembangan Aset Tak Berwujud pada Satker Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Portal Satu Data sebesar Rp806.690.550,00;
2. Pengadaan Sistem Analisis Data Tindak Lanjut (*Advanced Analytics*) sebesar Rp2.832.846.650,00;
3. Pengembangan Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sebesar Rp35.872.490.582,00;
4. Pengembangan Sistem Kepegawaian Terintegrasi dengan Aplikasi Perkantoran (*e-Office*) sebesar Rp2.812.140.500,00; dan
5. Pengembangan Aplikasi Potensi Investasi Regional (PIR) sebesar Rp906.037.500,00

Daftar rincian Aset Tak Berwujud disajikan dalam **Lampiran 5** Laporan Keuangan ini.

C.13 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp78.629.147.521,00 dan Rp79.696.684.428,00.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (DYDP) merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Tabel C.13.
DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	78.629.147.521	79.696.684.428
Jumlah	78.629.147.521	79.696.684.428

Adapun Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Tahun 2024 merupakan dana pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas Kontrak pekerjaan dengan tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 21 s.d 31 Desember 2024 yang sudah membebani anggaran namun belum dibayarkan kepada penyedia yang berhak.

C.14 Aset Lain - Lain

Aset Lain
Lain

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama masing-masing sebesar Rp24.264.826.079,00 dan Rp24.239.552.857,00.

Tabel C.14.1
ASET LAIN-LAIN PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Aset Lain-lain	24.264.826.079	24.239.552.857
Jumlah	24.264.826.079	24.239.552.857

Terdapat mutasi nilai Aset Lain-Lain pada Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	24.239.552.857
Mutasi tambah:	664.182.486
Penambahan Deposit Sewa Kantor IIPC	664.182.486
Mutasi Kurang:	638.909.264
1. Koreksi pencatatan nilai kurs per 31 Desember 2023	418.218.824
2. Beban Selisih Kurs per 31 Desember 2024	220.690.440
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	24.264.826.079
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	17.771.062.364
Nilai Buku per 31 Desember 2024	6.493.763.715

Mutasi tambah sebesar Rp664.182.486,00 seluruhnya berasal dari transaksi penambahan Deposit sewa ruang kantor *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) tahun 2024 (menggunakan kurs pada saat transaksi) dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan deposit sewa ruang kantor IIPC Singapore sebesar Rp49.394.668,00
2. Penambahan deposit sewa ruang kantor IIPC Sydney sebesar Rp614.787.818,00.

Mutasi Kurang sebesar Rp638.909.264,00 berasal dari:

1. Koreksi pencatatan sebesar Rp418.218.824,00 merupakan koreksi atas saldo deposit sewa ruang kantor per 31 Desember 2023 yang semula dicatat menggunakan kurs transaksi dengan nilai Rp6.468.490.493,00 dikoreksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp6.050.271.669,00. Atas deposit yang menggunakan mata uang tertentu yang tidak terdapat dalam kurs tengah BI dilakukan koreksi dengan cara melakukan konversi ke dalam mata uang USD terlebih dahulu.
2. Pencatatan beban selisih kurs sebesar Rp220.690.440,00 merupakan penyesuaian nilai deposit sewa kantor IIPC berdasarkan kurs tengah BI per 31 Desember 2024.

Rincian Aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.264.826.079,00 terdiri dari:

URAIAN	31 DES 2024
1. Deposit Sewa Ruang Kantor IIPC	6.493.763.715
2. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	17.098.177.364
3. Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional	672.885.000
Jumlah	24.264.826.079

1. Deposit sewa ruang kantor pada kantor perwakilan BKPM di Luar Negeri, *Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)*, yang masih berada pada pemilik Gedung sebesar Rp6.493.763.715,00. Deposit sewa akan dikembalikan ke Kas Negara pada saat perjanjian sewa berakhir dan/tidak diperpanjang akibat kantor perwakilan mengalami perpindahan atau penutupan. Rincian deposit sewa ruang kantor disajikan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel C.14.2
DEPOSIT SEWA KANTOR IIPC PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Pemilik Gedung (Lessor)	IIPC (Lessee)	Nilai Deposit	Kurs Per 31-12-2024	Jumlah
1	Fukoku Mutual Saimai Insurance Company	Tokyo, Jepang	JPY 15.460.170,00	102,36	1.582.540.879
2	Sentec Real Estate Investment Trust	Singapura	SGD 51.624,00	11.919,34	512.770.007
3	Servcorp Administration Services Ltd	Abu Dhabi, UEA	AED 94.840,00	4,389	417.373.473
4	Sherwood 370 Lexington LLC (d/h)	New York, USA	USD 26.693,23	16,162	431.415.983
5	Landmark Space Limited	London, Inggris	GBP 28.400,00	20.332,61	577.446.124
6	Daxus Property Group	Sydney, Australia	AUD 198.705,00	10.081,88	2.003.330.047
7	SIFC Tower One Development YH	Seoul, Korea Selatan	KRW 88.281.294,00	10,98	958.887.202
				Total	6.493.763.715

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp17.098.177.364,00 berasal dari pencatatan atas aset yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional kantor, baik karena kondisi rusak berat maupun non rusak berat berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Tabel C.14.3
RINCIAN ASSET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH

(Dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja	Jenis Aset	Jumlah
1	Sekretariat Utama	PM	15.957.466.864
2	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal	PM	84.300.000
3	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	PM	41.800.000
4	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	PM	14.610.500
		Total	17.098.177.364

Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan disajikan dalam **Lampiran 6** Laporan Keuangan ini. Rincian barang sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- i) Barang dengan Kondisi Rusak Berat senilai Rp10.630.295.294,00 antara lain berupa Sepeda Motor, Televisi, Peralatan Jaringan Lainnya, dan Notebook.

Atas barang dengan kondisi rusak berat ini akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan pada periode tahun 2025.

- ii) Barang dengan Kondisi Non Rusak Berat senilai Rp6.467.882.070,00 antara lain berupa 9 (sembilan) unit sedan dan 16 (enam belas) unit minibus. Atas barang dengan kondisi non rusak berat telah dilakukan cek fisik ulang dan berdasarkan hasil cek fisik tersebut akan dilakukan penggunaan kembali BMN di tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) unit sedan dan 14 (empat belas) unit Minibus. Sementara atas 2 (dua) unit Minibus yang kondisinya rusak akan diusulkan untuk dihapuskan.
3. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp672.885.000,00 berasal dari pencatatan penghentian aset atas *Software* berupa Sistem *Helpdesk* Layanan Berusaha (NUP 12) sebesar Rp290.400.000,00 dan Sistem Penyampaian Data Elektronik (NUP 13) sebesar Rp382.485.000,00 yang sudah tidak digunakan lagi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK R.I. pada Satker Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Atas Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud di atas sedang dalam proses penghapusan.

C.15 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(124.456.192.669,00) dan Rp(76.081.722.295,00).

Tabel C.15.1
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(124.456.192.669)	(76.081.722.295)
Jumlah	(124.456.192.669)	(76.081.722.295)

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Beban Penyusutan/ Amortisasi	Saldo
Akm. Peny. Aset Tetap yang tidak digunakan	17.098.177.364	-	17.098.177.364
Akumulasi Amortisasi Software	58.166.891.091	48.240.528.516	106.407.359.607
Akumulasi Amortisasi Lisensi	143.628.840	133.941.858	277.770.698
Akm. Peny. Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	672.885.000	-	672.885.000
Total	76.081.722.295	48.374.470.374	124.456.192.669

C.16 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang
Kepada
Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp77.075.313.679,00 dan Rp81.012.548.924,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tabel C.16.1

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Utang Kepada Pihak Ketiga	77.075.313.679	81.012.548.924
Jumlah	77.075.313.679	81.012.548.924

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga disajikan dalam daftar berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DES 2024	31 DES 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	68.112.055	366.969.289
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	801.611.987	814.722.587
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	76.205.589.625	79.830.857.048
Total	77.075.313.679	81.012.548.924

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp68.112.066,00 seluruhnya merupakan kekurangan pembayaran Belanja Pegawai tahun 2024 yang baru diajukan pembayarannya pada bulan Januari tahun 2025.
2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp801.611.987,00 terdiri dari:

- Tagihan Listrik dari PT PLN Persero atas Gedung Diklat, Gedung Kantor, Gedung Parkir, dan Gedung Auditorium Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk periode Desember 2024 dengan nomor Tagihan AGA/PUSAT/2025/017202 sebesar Rp786.252.728,00 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2025.
 - Tagihan Telepon dari PT Telkom atas pemakaian telepon di Gedung Kantor dan *Daycare* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk periode Desember 2024 dengan nomor Tagihan masing-masing 0420250105000172020001 sebesar Rp14.480.031,00, 50111209664 dan 50111210134 sebesar Rp416.700,00 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2025.
 - Tagihan *Handphone* dari PT Indosat atas pemakaian jaringan telekomunikasi Unit Protokol Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk periode Desember 2024 dengan nomor Tagihan 0250884781 sebesar Rp325.028,00 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2025.
 - Tagihan Air dari PT PAM atas Gedung Diklat untuk periode Desember 2024 dengan nomor Tagihan 12180A-13/2025/800266 sebesar Rp137.500,00 yang baru dibayarkan bulan pada Januari 2025.
3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp76.205.589.626,00 terdiri dari:
- Honorarium Tetap Bulan Desember 2024 sebesar Rp461.577.104,00 yang belum diserahkan kepada pegawai yang berhak sampai dengan tanggal pelaporan dan baru diserahkan pada bulan Januari 2025.
 - Tagihan Kontrak pekerjaan dengan tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 21 s.d 31 Desember 2024 yang dananya tersimpan dalam RPATA namun belum dibayarkan kepada penyedia yang berhak sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp75.744.012.522,00.

C.17 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima di
Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.076.085.105,00 dan Rp1.770.863.838,00. Pendapatan Diterima Di muka merupakan pendapatan PNBK yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Tabel C.17.
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Pendapatan Diterima Di muka	1.076.086.105	1.770.863.838
Jumlah	1.076.086.105	1.770.863.838

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 seluruhnya berasal dari Pendapatan Sewa pada Satker Sekretariat Utama berupa Pendapatan Sewa Ruang Kantor/Lahan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah		Penjelasan
	31-12-2024	31-12-2023	
PT. BRI (Persero), Tbk.	142.484.678	229.093.011	Sewa Ruang Kantor
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	372.947.777	596.716.444	Sewa Ruang Kantor
PT. Telkom	322.254.000	483.381.000	Sewa Lahan
Koperasi Karyawan "Pecandaran"	171.657.050	271.168.383	Sewa Ruang Kantor
PT. Bank Negara Indonesia, Tbk	38.101.000	190.505.000	Sewa Ruang Kantor
Kantor Notaris Milne Ng	28.641.600	-	Sewa Ruang Kantor
Total	1.076.086.105	1.770.863.838	

C.18 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp104.475.690,00 dan Rp678.341.646,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.19 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang
Jangka
Pendek
Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.382.184,00 dan Rp3.281.807,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada tanggal pelaporan seluruhnya berasal dari utang pajak yang belum disetor ke Kas negara oleh Bendahara Pengeluaran pada Satker DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur. Atas Utang Pajak dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara pada bulan November 2024 namun terdapat kesalahan kode penyetoran akun pajak yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses perbaikan.

C.20 Ekuitas

Ekuitas Ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.311.950.043.091,00 dan Rp2.288.895.571.531,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP

Jumlah Pendapatan pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp798.282.016,00 dan Rp675.091.049,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.1.
PERBANDINGAN RINCIAN PENDAPATAN T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/ (turun)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	762.169.733	659.446.855	15,58
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	200.819	433.932	(53,72)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35.908.470	10.584.134	239,27
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	2.994	4.626.118	(99,94)
Jumlah	798.282.016	675.091.049	18,25

Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 terjadi peningkatan nilai pendapatan pada Tahun 2024 sebesar 18,25 persen yang berasal dari peningkatan penerimaan pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan, dan penerimaan dari pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut.

- A. Pengakuan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp762.169.733,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp86.608.333,00;
 - 2) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp223.768.667,00;
 - 3) PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp161.127.000,00;
 - 4) Koperasi "Pecanderaan" sebesar Rp99.511.333,00;
 - 5) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp152.404.000,00; dan
 - 6) Kantor Notaris Mina NG sebesar Rp38.750.400,00.
- B. Pengakuan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Tahun 2024 sebesar Rp200.819,00 berasal dari Satker Sekretariat Utama sebesar Rp19.107,00 atas Bunga Rekening Giro RPL bulan Mei s.d Juli 2024 dan Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sebesar Rp181.712,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bunga Rekening Bank IIPC Seoul sebesar Rp13.082,00;

- 2) Bunga Rekening Bank IIPC Tokyo sebesar Rp730,00; dan
 - 3) Bunga Rekening Bank IIPC Taipei sebesar Rp167.900,00;
- C. Pengakuan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah T.A. 2024 sebesar Rp35.908.470,00 yang berasal dari:
- 1) Satker Sekretariat Utama sebesar Rp24.001.056,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Loose Furniture Ruang Kerja Lantai 7 sebesar Rp6.905.632,00;
 - ii. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Loose Furniture Ruang Kerja Lantai 8 sebesar Rp11.492.000,00;
 - iii. Kekurangan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Loose Furniture Ruang Kerja Lantai 7 sebesar Rp431.602,00;
 - iv. Kekurangan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Loose Furniture Ruang Kerja Lantai 8 sebesar Rp718.250,00;
 - v. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Kajian Dampak Survei Kemudahan Berusaha terhadap Arus *Foreign Direct Investment* (FDI) di Negera Berkembang sebesar Rp171.172,00;
 - vi. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyusunan Kajian Penguatan Organisasi Kementerian Investasi/BKPM Dalam Rangka Penyusunan RUU Tentang Perubahan UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebesar Rp929.494,00; dan
 - vii. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyusunan Kajian Kebijakan Dasar Penanaman Modal Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebesar Rp3.352.906,00.
 - 2) Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal sebesar Rp11.907.414,00 berupa Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemeliharaan dan Pemutakhiran Website Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- D. Pengakuan Pendapatan Anggaran Lain-lain T.A. 2024 sebesar Rp2.994,00 berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa kelebihan pengembalian belanja pegawai a.n. Eka Sastra.

Terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Pend-LRA	Pend-LO	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	67.392.000	762.169.733	(694.777.733)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	388.132	200.819	187.313
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35.908.470	35.908.470	-
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	2.994	2.994	-
Jumlah	103.691.596	798.282.016	(694.590.420)

Perbedaan nilai sebesar Rp(694.590.420,00) disebabkan karena perbedaan metode pencatatan dimana Pendapatan-LRA menggunakan *Cash Basis* sementara Pendapatan LO menggunakan *Akruat Basis*. Penjelasan atas selisih per jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Selisih nilai pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan sebesar Rp(694.777.733,00) berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan yang secara riil diakui sebagai pendapatan di Tahun 2024;
2. Selisih nilai pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp187.313,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang secara riil diakui sebagai pendapatan di Tahun 2024;

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp240.921.172.808,00 dan Rp142.126.401.683,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.2.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PEGAWAI T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	79.668.008.476	77.664.020.598	2,58
Beban Tunjangan Lain-lain Pejabat Negara	186.900.170	-	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.110.741.400	2.098.787.500	(47,08)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	1.080.172.770	-	100,00
Beban Honorarium	7.571.357.344	6.241.512.506	21,31
Beban Lembur	73.633.000	66.548.900	10,64
Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	150.211.067.783	56.055.532.179	167,97
Beban Tunjangan Khusus PPPK	1.019.291.865	-	100,00
Jumlah	240.921.172.808	142.126.401.683	69,51

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja-LRA dengan Beban-LO per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	79.850.498.982	79.668.008.475	192.490.506
Beban Tunjangan Lain-lain Pejabat Negara	186.900.170	186.900.170	0
Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.110.741.400	1.110.741.400	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	1.080.172.770	1.080.172.770	0
Beban Honorarium	7.555.041.305	7.571.374.344	0
Beban Lembur	73.633.000	73.633.000	0
Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	150.289.780.778	150.211.067.783	78.712.995
Beban Tunjangan Khusus PPPK	1.019.291.865	1.019.291.865	0
Jumlah	241.176.060.270	240.921.172.808	271.203.501

Perbedaan nilai sebesar Rp271.203.501,00 disebabkan karena perbedaan metode pencatatan dimana Belanja-LRA menggunakan *Cash Basis* sementara Beban-LO menggunakan *Akrual Basis*. Penjelasan atas selisih per jenis beban adalah sebagai berikut:

1. Selisih nilai Beban Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp192.490.506,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas Beban Gaji dan Tunjangan PNS yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024; dan
2. Selisih nilai Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito sebesar Rp78.712.995,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024.

D.3 Beban Persediaan

Beban
Persediaan

Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.402.439.685,00 dan Rp5.083.250.300,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.3.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/turun
Beban Persediaan Konsumsi	4.402.439.685	5.083.250.300	(13,39)
Jumlah	4.402.439.685	5.083.250.300	(13,39)

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja-LRA dengan Beban-LO per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih
Beban Persediaan Konsumsi	4.769.954.118	4.402.439.685	367.514.433
Jumlah	4.769.954.118	4.402.439.685	367.514.433

Perbedaan nilai sebesar Rp367.514.433,00 disebabkan karena perbedaan metode pencatatan dimana Belanja-LRA menggunakan *Cash Basis* sementara Beban-LO menggunakan *Akruat Basis*. Pada LRA Belanja Persediaan dihitung berdasarkan jumlah persediaan yang dibeli di Tahun Anggaran 2024, sementara Beban Persediaan pada LO dihitung berdasarkan jumlah persediaan yang terpakai di Tahun Anggaran 2024.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban
Barang dan
Jasa

Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp568.904.240.361.616,00 dan Rp664.987.750.735,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.4.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN BARANG DAN JASA T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Beban Barang Operasional	45.359.126.404	43.096.620.499	5,25
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	-	899.177.219	(100,00)
Beban Barang Non Operasional	55.552.551.762	61.430.640.333	(9,57)
Beban Langganan Daya dan Jasa	10.555.013.020	11.084.626.755	(4,78)
Beban Jasa Konsultan	136.887.870.292	134.879.575.765	1,49
Beban Sewa	90.398.504.200	92.381.515.326	(2,15)
Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	9.491.175.718	-	100,00
Beban Jasa Profesi	8.449.086.059	10.542.876.501	(19,86)
Beban Jasa Lainnya	212.212.034.161	330.471.340.337	(31,65)
Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	-	201.738.000	(100)
Jumlah	568.904.361.616	664.987.750.735	(14,45)

Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 terjadi penurunan nilai beban sebesar 14,45 persen pada tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pada Beban terkait Pandemi COVID-19, Beban Barang Non Operasional, Beban Langganan Daya dan Jasa, Beban Jasa Konsultan, Beban Jasa Profesi, dan Beban Jasa Lainnya.

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja-LRA dengan Beban-LO per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih
Beban Barang Operasional	45.604.115.505	45.358.126.404	245.989.101
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional	55.827.477.261	55.552.551.762	274.925.499
Beban Langganan Daya dan Jasa	10.597.193.620	10.555.013.020	42.180.600
Beban Jasa Konsultan	137.186.381.289	136.887.870.292	298.510.997
Beban Sewa	97.049.056.081	90.398.504.200	6.650.551.881
Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	9.545.235.718	9.491.175.718	54.060.000
Beban Jasa Profesi	8.449.086.059	8.449.086.059	-
Beban Jasa Lainnya	227.637.454.328	212.212.034.161	15.425.420.167
Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Jumlah	591.895.999.861	568.904.361.616	22.991.638.245

Perbedaan nilai sebesar Rp22.991.638.245,00 disebabkan karena perbedaan metode pencatatan dimana Belanja-LRA menggunakan *Cash Basis* sementara Beban-LO menggunakan *Akrual Basis*. Penjelasan atas selisih per jenis beban adalah sebagai berikut:

1. Selisih nilai Beban Barang Operasional sebesar Rp245.989.101,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas Beban Barang Operasional yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024;
2. Selisih nilai Beban Barang Non Operasional sebesar Rp274.925.499,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas Beban Barang Non Operasional yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024;
3. Selisih nilai Beban Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp42.180.600,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas Beban Langganan Daya dan Jasa yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024;

4. Selisih nilai Beban Jasa Konsultan sebesar Rp298.510.997,00 berasal dari jurnal penyesuaian atas Beban Jasa Konsultan yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024 berdasarkan selisih antara Surat Perintah Membayar (SPM) RPATA Penampungan dengan SPM RPATA Pembayaran;
5. Selisih nilai Beban Sewa sebesar Rp6.650.551.881,00 berasal dari jurnal penyesuaian atas Beban Sewa yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024;
6. Selisih nilai Beban Fasilitas Sewa Rumah sebesar Rp54.060.000,00 berasal dari jurnal penyesuaian atas Beban Fasilitas Sewa Rumah yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024;
7. Selisih nilai Beban Jasa Lainnya sebesar Rp15.425.420.167,00 berasal dari jurnal penyesuaian atas Beban Jasa Lainnya yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024 serta selisih atas penampungan dan pembayaran RPATA.

D.5 Beban Pemeliharaan

Belanja
Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.873.066.245,00 dan Rp17.718.756.735,00, dengan rincian:

Tabel D.5.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.814.415.035	10.023.188.825	(12,06)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	464.467.743	358.314.213	29,63
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.790.202.567	6.442.048.036	(10,12)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	610.685.500	815.810.249	(25,14)
Beban Pemeliharaan Lainnya	193.295.400	64.979.400	197,47
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	14.416.012	(100,00)
Jumlah	15.873.066.245	17.718.756.735	(10,42)

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Belanja-LRA dengan Beban-LO pada akun Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024.

(Dalam Rupiah)

Uraian	Belanja-LRA	Belanja-LO	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.814.415.035	8.814.415.035	0
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	464.467.743	464.467.743	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.790.202.567	5.790.202.567	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	610.685.500	610.685.500	0
Beban Pemeliharaan Lainnya	193.295.400	193.295.400	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	15.873.066.245	15.873.066.245	0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp202.175.321.588,00 dan Rp203.840.036.292,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.6.

PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PERJALANAN DINAS T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	134.350.276.148	121.877.863.352	10,23
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	67.825.045.440	81.962.172.940	(17,25)
Jumlah	202.175.321.588	203.840.036.292	(0,82)

Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023, Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengalami peningkatan sebesar 24,34 persen. Sebaliknya, Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri mengalami penurunan signifikan, yaitu sebesar 17,24 persen. Secara keseluruhan, pada T.A. 2024 terdapat penurunan pada Beban Perjalanan Dinas sebesar 0,82 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada T.A. 2023.

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Belanja-LRA dengan Beban-LO per 31 Desember 2024.

(Dalam Rupiah)

Uraian	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	134.350.276.148	134.350.276.148	0
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	67.825.045.440	67.825.045.440	0
Jumlah	202.175.321.588	202.175.321.588	0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban
Barang untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.347.090,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.7.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	1.347.090	(100,00)
Jumlah	0	1.347.090	(100,00)

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp91.521.216.230,00 dan Rp62.967.177.011,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.8.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.684.281.540	26.269.597.095	9,19
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.210.193.836	13.095.614.685	8,51
Beban Penyusutan Jaringan	123.797.493	123.797.493	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	76.597.362	76.597.362	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	51.875.625	49.586.250	4,62
Beban Amortisasi Software	48.240.526.516	23.351.983.926	106,58
Beban Amortisasi Lisensi	133.941.858	-	100
Jumlah	91.521.216.230	62.967.177.011	45,35

D.9 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan
Non
Operasional

Rincian Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9.
PERBANDINGAN RINCIAN KEGIATAN NON OPERASIONAL T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	147.889.999	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	3.841.653.213	19.662.459.303	(80,46)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	29.004.250	66.301.532	(56,25)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	7.834.288.600	8.219.984.991	(4,69)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	34.585.897	(100,00)
Beban Persediaan Rusak/Usang	424.532.381	-	100,00
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	243.692.820	-	100,00
Beban Lain-lain	2.762	1.603	72,30
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	3.353.411.674	(11.193.698.487)	129,96

1. Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp3.841.653.213,00 berasal dari hibah keluar aset tetap peralatan dan mesin berupa 3 (tiga) unit Bus Listrik.
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp29.004.250,00 merupakan pengembalian atas pembayaran belanja pegawai pada Tahun 2023 yang disetorkan ke kas negara di Tahun 2024.
3. Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp424.532.381,00 merupakan pencatatan atas persediaan yang antara lain berupa kertas, map, amplop, cap, dan ATK lain yang telah usang akibat perubahan nomenklatur Kementerian Investasi/BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
4. Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp243.692.820,00 berasal dari oleh:
 - a. Beban sebesar Rp23.002.380,00 yang ditimbulkan atas transaksi pembayaran menggunakan mata uang asing atas pekerjaan Sewa Ruangan Indonesia Pavilion pada *World Economic Forum* (WEF) Davos, berupa selisih antara nilai pada saat diterbitkan SPM sebesar Rp5.940.364.635,00 dengan nilai pada saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp5.963.367.015,00.
 - b. Beban sebesar Rp220.690.440,00 yang ditimbulkan akibat koreksi atas nilai Deposit sewa kantor IIPC T.A. 2024 berdasarkan temuan pemeriksaan BPK R.I. atas penggunaan kurs, yang semula menggunakan kurs pada tanggal transaksi menjadi kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
5. Beban Lain-Lain sebesar Rp2.762,00 merupakan beban yang berasal dari selisih kurs atas bunga bank pada rekening IIPC.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.288.895.571.531,00 dan Rp2.311.419.950.932,00.

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Surplus/Defisit LO Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(1.119.645.884.482,00) dan Rp(1.107.374.626.982,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Transaksi Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sama sebesar Rp0,00.

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp98.990.825,00

E.5 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali Aset Tetap yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018 dan hasil perbaikan pada Tahun 2019. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama masing-masing sebesar Rp0,00.

E.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(316.903.265,00) dan Rp(433.022.763,00). Koreksi ini berasal dari Transaksi Koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp(316.903.265,00) disebabkan oleh:

1. Koreksi pencatatan atas pekerjaan Renovasi Toilet Rooftop Gedung Parkir Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang semula dicatat pada Gedung Kantor Permanen NUP 1 dikoreksi menjadi Bangunan Parkir Tertutup Permanen NUP 1.
2. Koreksi pencatatan atas Asrama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang semula dicatat pada 1 NUP dikoreksi menjadi 21 NUP.

E.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(419.143.824,00) dan Rp37.261.500,00. Koreksi lain-lain sampai dengan 31 Desember 2024 berasal dari:

1. Koreksi perhitungan nilai piutang bukan pajak atas gaji induk a.n. Usamah Widiatmoko yang semula sebesar Rp4.556.800,00 dikoreksi menjadi sebesar Rp3.631.800,00 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor 44/B.3/A.3/2024 tanggal 15 Februari 2024 sehingga menimbulkan koreksi sebesar Rp(925.000,00).
2. Koreksi atas nilai Deposit IIPC per 31 Desember 2023 sebesar Rp(418.218.824,00), berdasarkan temuan pemeriksaan BPK R.I. atas penggunaan kurs, yang semula menggunakan kurs pada tanggal transaksi menjadi, menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

E.8 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.143.436.403.131,00 dan Rp1.085.147.018.019,00. Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN. Rincian transaksi antar entitas pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.147.741.865.665
Diterima dari Entitas Lain	(8.442.627.534)
Pengesahan Hibah Langsung	4.137.165.000
JUMLAH	1.143.436.403.131

E.8.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima Dari Entitas Lain/Ditagihkan Ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp1.147.741.865.665,00 sedangkan DDEL sebesar Rp(8.442.627.534,00).

E.8.2 Pengesahan Hibah Langsung

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat transaksi pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp4.137.165.000,00 yang berasal dari pencatatan penerimaan aset berupa 3 (tiga) unit Bus Listrik pada Satker Sekretariat Utama berdasarkan:

1. Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Nomor S-30/PR.8/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penerbitan Register Nomor 2M3BS2DA (Hibah Barang Berupa Tiga Bus Listrik dari Anhui Jianghui Automobile Group Corp., Ltd kepada Satker Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk Program *Green Transportation Vehicles* di Indonesia); dan
2. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 814877515884328195 Tanggal 23 Januari 2024.

E.9 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.311.950.043.091,00 dan Rp2.288.895.571.531,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pengembalian Tanah dan Bangunan oleh Pensiunan Kementerian Investasi dan Hilirisasi a.n. Said Ridwan

Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengirimkan surat Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Nomor 1091/A.3/B.3/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang pemberitahuan atas status kepemilikan rumah dinas yang berlokasi di Jalan Bima Raya Nomor 120 Depok. Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kemudian melakukan pemasangan plang di halaman rumah dinas yang menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan aset negara yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa status kepemilikan rumah dinas tersebut diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan aset negara. Selanjutnya, pada pertengahan bulan Februari 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menerima pengembalian kunci rumah dinas, menandai penyelesaian proses pengembalian aset negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Catatan Penting Lainnya atas Laporan Realisasi Anggaran

a. Capaian Output Strategis K/L

Selama Tahun Anggaran 2024 *output* strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebagai berikut:

- 1) Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal untuk T.A. 2024 adalah sebesar Rp1.714,2T yaitu 103,9% dari target Presiden sebesar Rp1.650T, serta 132,54,3% dari target Renstra sebesar Rp1.293,3T. Adapun realisasi investasi ini meningkat sebesar 20,8% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder untuk TA. 2024 adalah sebesar Rp205,5T atau 45,4% dari total Penanaman Modal Asing

(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder merupakan realisasi penanaman modal sektor sekunder yang diraih baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di luar migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil. Adapun ruang lingkup sektor sekunder meliputi:

1. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
 2. Industri Makanan;
 3. Industri Kimia dan Farmasi;
 4. Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain;
 5. Industri Kertas dan Percetakan;
 6. Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam;
 7. Industri Tekstil;
 8. Industri Karet dan Plastik;
 9. Industri Mineral Non-Logam;
 10. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
 11. Industri Kayu; dan
 12. Industri Lainnya
- 3) Capaian Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (Di Luar Jawa) untuk TA. 2024 adalah sebesar Rp859,4T. Penanaman Modal Berkualitas ditetapkan dalam rangka mengejar pemerataan ekonomi khususnya untuk wilayah di luar Jawa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi untuk mencapai pemerataan yang ditujukan terhadap wilayah-wilayah di luar Jawa;
- 4) Capaian Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM untuk TA. 2024 adalah sebesar Rp814T atau 47,5% dari total realisasi penanaman modal. Adapun capaian PMDN ini mengalami peningkatan sebesar 20,6% dibandingkan realisasi yang sama pada TA. 2023;
- 5) Pada tahun 2021, secara resmi diumumkan pemberhentian penerbitan laporan EoDB dan adanya rencana penyusunan pendekatan baru yang dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha. Sejak tahun 2022 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia mengacu pada *World Competitiveness Yearbook 2023* yang diterbitkan Institute for Management Development (IMD). Dalam *World Competitiveness Yearbook 2023*, indeks daya saing kemudahan berusaha Indonesia mengalami peningkatan yang semula berada di peringkat 44 di Tahun 2022, menjadi peringkat 34 di tahun 2023 dari total 64 negara di seluruh dunia. Dan ditahun

2024 menjadi peringkat 27. Selain IMD, evaluasi target dilanjutkan melalui survei IMD dan B-Ready yang memiliki metodologi yang berbeda;

- 6) Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk TA. 2024 adalah 71,91 dengan peringkat "BB" (Baik), yaitu 89,88% dari target 80 dengan peringkat "A" (Sangat Baik); dan
- 7) Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM TA. 2023 yang dikeluarkan di Tahun 2024 memperoleh opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini atas Laporan Keuangan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

b. Capaian Output per Fungsi APBN

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diklasifikasikan ke dalam 1 fungsi yaitu fungsi Ekonomi (04). Capaian *output* utama per Fungsi APBN dijabarkan dalam **Lampiran 7** laporan keuangan ini.

c. Capaian Output per Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pagu anggaran PN yang dikelola Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebesar Rp458.987.353.000,00 dengan total realisasi sebesar Rp441.100.105.706,00, sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 8** laporan keuangan ini.

Catatan Penting Lainnya atas Neraca

Pada bagian Aset Lain-lain yang dimiliki oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per tanggal 31 Desember 2024, terdapat deposit sewa ruang kantor perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di luar negeri, *Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)*, sebesar Rp6.493.763.715,00 yang masih berada pada pihak pemilik Gedung. Pelaksanaan pembayaran atas sewa kantor dimaksud dilakukan secara tahunan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, dalam Surat Perjanjian Sewa yang telah disepakati antara kedua belah pihak, juga telah ditetapkan masa sewa yang mencakup rincian lebih lanjut mengenai periode sewa serta ketentuan lain yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait penggunaan ruang kantor. Dalam Perjanjian Sewa telah ditetapkan masa sewa dengan rincian sebagai berikut:

No	Pemilik Gedung (Lessor)	IIPC (Lessee)	Periode Kontrak	
			Mulai	Berakhir
1	Fukoku Mutual Seimei Insurance Company	Tokyo, Jepang	1 Juni 2024	31 Mei 2027
2	Suntec Real Estate Investment Trust	Singapura	15 Mei 2025	30 Juni 2028
3	Servcorp Administration Services Ltd	Abu Dhabi, UEA	1 April 2022	31 Maret 2025
4	Sherwood 370 Lexington LLC (d/h)	New York, USA	1 April 2021	31 Mei 2026
5	Landmark Space Limited	London, Inggris	1 Januari 2025	31 Desember 2025
6	Dexus Property Group	Sydney, Australia	1 Januari 2025	31 Desember 2027
7	SIFC Tower One Development YH	Seoul, Korea Selatan	13 Januari 2024	12 Januari 2027

Jakarta, **09 MAY 2025**

Menteri Investasi dan Hilirisasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani



**MINISTRY OF INVESTMENT AND DOWNSTREAM INDUSTRY/
INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD**



Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)

**Investasi Tumbuh,
Indonesia Maju**

Jl. Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190

**RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2024**

A. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (065) KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

B. VISI : BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."

C. MISI : 01 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
: 02 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

D. FUNGSI : 04 EKONOMI

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2024	2025	2026	2027
	<u>Sasaran Strategis</u> Meningkatnya realisasi penanaman modal <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Nilai realisasi penanaman modal 1.239,3 1.239,3 <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder 646,1 646,1 <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Sebaran penanaman modal berkualitas (di Luar Jawa) 51,7 51,7 <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Kontribusi penanaman modal dalam negeri/PMDN termasuk UMKM 53,1 53,1 <u>Sasaran Strategis</u> Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) 40 40 <u>Sasaran Strategis</u> Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Nilai Reformasi Birokrasi BKPM A/ (>80% - 90%) A/ (>80% - 90%) <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Opini atas laporan keuangan BKPM WTP WTP				
065.01	<u>Eselon 1</u> Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	1,229,295,942	1,252,189,452	1,279,064,962	1,312,517,383

ED	Program Program Penanaman Modal	810,232,102	824,467,563	841,218,357	862,092,775
	Sasaran Program Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal Indikator Kinerja Program Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal	4,0	4,0		
	Sasaran Program Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal Indikator Kinerja Program Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (starting a business) Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM	3/3 205	3/3 205		
	Sasaran Program Meningkatnya kualitas kerjasama penanaman modal Indikator Kinerja Program Kesepakatan/perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	69	69		
	Sasaran Program Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal Indikator Kinerja Program Jumlah Minat Penanaman Modal Nilai Komitmen Penanaman Modal	9.100 2.065,5	9.100 2.065,5		
	Sasaran Program Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	3,50	3,50		
	Sasaran Program Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal Indikator Kinerja Program Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking)	143	143		
	Sasaran Program Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis Indikator Kinerja Program Fasilitasi Investasi Strategis Melalui Hilirisasi				
	Sasaran Program Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal Indikator Kinerja Program Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				
	Sasaran Program Meningkatnya pelayanan informasi perizinan berusaha berbasis resiko Indikator Kinerja Program Indeks kepuasan masyarakat atas layanan informasi perizinan berusaha berbasis resiko	3	3	3	
3213	KEGIATAN Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	26,840,000	27,399,103	28,052,753	28,864,673

PBB	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2 Usulan	2 Usulan	2 Usulan	0 Usulan
	- Jumlah Usulan Rekomendasi Terkait Sinkronisasi Kebijakan Investasi	1 Usulan	1 Usulan	1 Usulan	0 Usulan
	- Jumlah Usulan Rekomendasi terkait Kebijakan Ekosistem Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing	1 Usulan	1 Usulan	1 Usulan	0 Usulan
	- Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha	2 Usulan	2 Usulan	2 Usulan	0 Usulan
	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	26,840,000	27,399,103	28,052,753	28,864,673
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha	2 Usulan Rekomendasi	2 Usulan Rekomendasi	2 Usulan Rekomendasi	
	- Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2 Usulan Rekomendasi	2 Usulan Rekomendasi	2 Usulan Rekomendasi	
	- Jumlah Usulan Rekomendasi Terkait Sinkronisasi Kebijakan Investasi	1 Usulan Rekomendasi	1 Usulan Rekomendasi	1 Usulan Rekomendasi	
	- Jumlah Usulan Rekomendasi terkait Transformasi Kebijakan Ekosistem Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif Untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing	1 Usulan Rekomendasi	1 Usulan Rekomendasi	1 Usulan Rekomendasi	
3214	<u>KEGIATAN</u> Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	2,952,967	3,014,475	3,086,389	3,175,721
FBA	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Fasilitas Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah	38 Daerah	38 Daerah	38 Daerah	38 Daerah
	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2,952,967	3,014,475	3,086,389	3,175,721
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Fasilitas Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah	38 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	
3215	<u>KEGIATAN</u> Pemberdayaan Usaha Nasional	26,000,000	26,541,623	27,174,820	27,961,334
BDG	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Kemitraan Usaha Nasional	1000 Kemitraan	1000 Kemitraan	1000 Kemitraan	0 Kemitraan
	- Jumlah Data Perusahaan PMA/PMDN Yang Wajib Bermitra Dan Pelaku UMKM Di Daerah Yang Siap Dimitrakan	1 Paket Buku	1 Paket Buku	1 Paket Buku	0 Paket Buku
	- Jumlah Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Nasional	1000 UMKM	1000 UMKM	1000 UMKM	0 UMKM
	- Jumlah Fasilitas bagi Pelaku UMKM dalam Rantai Pasok	500 UMKM	500 UMKM	500 UMKM	500 UMKM
	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3,000,000	3,062,490	3,135,553	3,226,303
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Nasional	1000 UMKM	1000 UMKM	1000 UMKM	

BMA	<u>KRO</u> Data dan Informasi Publik	1,000,000	1,020,828	1,045,181	1,075,433
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Data Perusahaan PMA/PMDN Yang Wajib Bermitra Dan Pelaku UMKM Di Daerah Yang Siap Dimitrakan	1 Paket Buku	1 Paket Buku	1 Paket Buku	
QDG	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	22,000,000	22,458,305	22,994,086	23,659,598
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Fasilitasi bagi Pelaku UMKM Dalam Rantai Pasok - Jumlah Kemitraan Usaha Nasional	500 UMKM 1000 Kemitraan	500 UMKM 1000 Kemitraan	500 UMKM 1000 Kemitraan	500 UMKM 1000 Kemitraan
3216	<u>KEGIATAN</u> Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal	171,071,372	174,635,235	178,801,462	183,976,459
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Analisis Market Intelligence Negara dan Sektor Prioritas Promosi Investasi - Jumlah Kegiatan Regional Investment Forum - Jumlah Bahan-Bahan Informasi Potensi Penanaman Modal - Jumlah Analisis Negara Target dan Negara Pesaing - Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) - Jumlah Perusahaan Asing yang berhasil difasilitasi untuk melakukan relokasi dan diversifikasi ke Indonesia	1 Laporan 1 Kegiatan 2 Layanan 2 Kajian 2388 Minat 11 Perusahaan	1 Laporan 1 Kegiatan 7 Layanan 2 Kajian 2323 Minat 11 Perusahaan	1 Laporan 1 Kegiatan 7 Layanan 2 Kajian 2323 Minat 11 Perusahaan	0 Laporan 0 Kegiatan 0 Layanan 0 Kajian 2323 Minat 11 Perusahaan
ABB	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2,500,000	2,552,075	2,612,960	2,688,587
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Analisis Market Intelligence Negara dan Sektor Prioritas Promosi Investasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
AEA	<u>KRO</u> Koordinasi	3,000,000	3,062,490	3,135,553	3,226,302
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Kegiatan Regional Investment Forum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
BMA	<u>KRO</u> Data dan Informasi Publik	61,575,071	62,857,867	64,357,450	66,220,126
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Bahan-Bahan Informasi Potensi Penanaman Modal	2 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	
PBB	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	4,100,000	4,185,404	4,285,250	4,409,282
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Analisis Negara Target dan Negara Pesaing	2 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	
PEH	<u>KRO</u> Promosi	68,896,301	70,331,577	72,009,461	74,093,606
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center)	2323 Minat Investasi	2323 Minat Investasi	2323 Minat Investasi	2323 Minat Investasi

QDH	KRO Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	31,000,000	31,645,822	32,400,788	33,338,556
	INDIKATOR KRO - Jumlah Perusahaan Asing yang berhasil difasilitasi untuk melakukan relokasi dan diversifikasi ke Indonesia	11 Perusahaan	11 Perusahaan	11 Perusahaan	
3225	KEGIATAN Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha	8,750,000	8,932,261	9,145,356	9,410,048
	SASARAN KEGIATAN -				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN -				
BAC	KRO Pelayanan Publik kepada badan usaha	8,750,000	8,932,261	9,145,356	9,410,048
	INDIKATOR KRO - Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas Berusaha terkait Masterlist - Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas Berusaha terkait Tax Allowance - Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas Berusaha terkait Tax Holiday	200 Badan Usaha 20 Badan usaha 20 Badan usaha	200 Badan Usaha 18 Badan usaha 18 Badan usaha	200 Badan Usaha 18 Badan usaha 18 Badan usaha	18 Badan usaha 18 Badan usaha 18 Badan usaha
3226	KEGIATAN Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	38,241,727	39,038,376	39,969,707	41,126,535
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya realisasi penanaman modal di Wilayah I (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung)				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah I - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah I - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah I - Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi - Jumlah Badan Usaha yang Menerima Fasilitas Penanaman Modal - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN	297 Triliun (Rp) 16 Badan Usaha 21 Badan Usaha 40 Badan Usaha 30 Badan Usaha 2 Badan Usaha	297 Triliun (Rp) 40 Badan Usaha 15 Badan Usaha 40 Badan Usaha 1 Badan Usaha 2 Badan Usaha	297 Triliun (Rp) 40 Badan Usaha 15 Badan Usaha 40 Badan Usaha 1 Badan Usaha 2 Badan Usaha	297 Triliun (Rp) 0 Badan Usaha 0 Badan Usaha 0 Badan Usaha 0 Badan Usaha 2 Badan Usaha
BDH	KRO Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	835,873	853,284	873,640	898,925
	INDIKATOR KRO - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah I	31 Badan Usaha	14 Badan Usaha	14 Badan Usaha	
BMA	KRO Data dan Informasi Publik	2,174,407	2,219,687	2,272,642	2,338,420
	INDIKATOR KRO - Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Wilayah I	297 Rp. Triliun	297 Rp. Triliun	297 Rp. Triliun	297 Rp. Triliun
QDH	KRO Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	35,231,447	35,965,405	36,823,425	37,889,190
	INDIKATOR KRO - Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi - Jumlah Badan Usaha yang Menerima Fasilitas Penanaman Modal - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah I	40 Badan Usaha 30 Badan Usaha 21 Badan Usaha	40 Badan Usaha 30 Badan Usaha 15 Badan Usaha	40 Badan Usaha 30 Badan Usaha 15 Badan Usaha	

	- Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN	2 Badan usaha	2 Badan usaha	2 Badan usaha	2 Badan usaha
3227	KEGIATAN Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	19,251,521	19,652,546	20,121,388	20,703,763
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya realisasi penanaman modal di Wilayah II (Provinsi Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah)				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Jumlah Badan Usaha Investasi Besar Bermitra dengan UMKM	31 Badan Usaha	70 Badan Usaha	70 Badan Usaha	0 Badan Usaha
	- Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah II	354,74 Triliun	354,74 Triliun	354,74 Triliun	354,74 Triliun
	- Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah II	45 Badan Usaha	36 Badan Usaha	36 Badan Usaha	0 Badan Usaha
	- Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah II	31 Badan Usaha	25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	0 Badan Usaha
	KRO				
BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1,600,000	1,633,327	1,672,290	1,720,695
	INDIKATOR KRO				
	- Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah II	45 Badan Usaha	15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	
	KRO				
BMA	Data dan Informasi Publik	3,772,049	3,850,603	3,942,470	4,056,578
	INDIKATOR KRO				
	- Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Wilayah II	354,74 Triliun (Rp)	354,74 Triliun (Rp)	354,74 Triliun (Rp)	354,74 Triliun (Rp)
	KRO				
QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	13,879,472	14,168,616	14,506,628	14,926,490
	INDIKATOR KRO				
	- Jumlah Badan Usaha Investasi Besar Bermitra dengan UMKM	31 Badan Usaha	31 Badan Usaha	31 Badan Usaha	
	- Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah II	31 Badan Usaha	25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	
3228	KEGIATAN Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	7,049,356	7,196,163	7,367,848	7,581,092
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya realisasi penanaman modal di Wilayah III (Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara)				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah III	577,51 Triliun	577,51 Triliun	577,51 Triliun	577,51 Triliun
	- Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah III	60 Badan Usaha	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	0 Badan Usaha
	- Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah III	26 Badan Usaha	20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	0 Badan Usaha
	- Jumlah Badan Usaha dalam rangka Eksekusi Realisasi Investasi pada proyek yang terkendala di Wilayah Barat	26 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	0 Badan Usaha
	KRO				
BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1,880,000	1,919,160	1,964,945	2,021,815
	INDIKATOR KRO				
	- Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah III	60 Badan Usaha	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	

BMA	<u>KRO</u> Data dan Informasi Publik	3,295,068	3,363,681	3,443,932	3,543,609
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Nilai Realisasi Penanaman Modal Yang Terpantau di Wilayah III	577,51 Triliun (Rp)	577,51 Triliun (Rp)	577,51 Triliun (Rp)	577,51 Triliun (Rp)
QDH	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1,874,288	1,913,322	1,958,971	2,015,668
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Badan Usaha dalam rangka Eksekusi Realisasi Investasi proyek strategis yang terkendala di Wilayah Barat - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah III	26 Badan Usaha 26 Badan Usaha	1 Badan Usaha 40 Badan Usaha	1 Badan Usaha 40 Badan Usaha	
3229	<u>KEGIATAN</u> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	19,319,823	19,721,882	20,192,407	20,776,889
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatkan realisasi penanaman modal di Wilayah IV (Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara dan Papua)				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah IV - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah IV - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV - Jumlah Lembaga yang Menerima Dana Dekonsentrasi Pemantauan Realisasi Investasi - Jumlah Badan Usaha dalam rangka Eksekusi Realisasi Investasi pada proyek yang terkendala di Wilayah Timur	321,75 Triliun 55 Badan Usaha 26 Badan Usaha 38 Lembaga 19 Badan Usaha	321,75 Triliun 50 Badan Usaha 30 Badan Usaha 34 Lembaga 1 Badan Usaha	321,75 Triliun 50 Badan Usaha 30 Badan Usaha 34 Lembaga 1 Badan Usaha	321,75 Triliun 0 Badan Usaha 0 Badan Usaha 0 Lembaga 0 Badan Usaha
BDH	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	2,265,000	2,312,180	2,367,343	2,435,858
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah IV	55 Badan Usaha	35 Badan Usaha	35 Badan Usaha	
BEI	<u>KRO</u> Bantuan Lembaga	10,000,000	10,207,936	10,451,490	10,754,044
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Lembaga yang Menerima Dana Dekonsentrasi Pemantauan Realisasi Investasi	38 Lembaga	38 Lembaga	38 Lembaga	38 Lembaga
BMA	<u>KRO</u> Data dan Informasi Publik	4,181,274	4,268,363	4,370,191	4,496,676
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Wilayah IV	321,75 Triliun (Rp)	321,75 Triliun (Rp)	321,75 Triliun (Rp)	321,75 Triliun (Rp)
QDH	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	2,873,549	2,933,403	3,003,383	3,090,311
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Badan Usaha dalam rangka Eksekusi Realisasi Investasi pada proyek yang terkendala di Wilayah Timur - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV	19 Badan Usaha 26 Badan Usaha	1 Badan Usaha 30 Badan Usaha	1 Badan Usaha 30 Badan Usaha	
3230	<u>KEGIATAN</u> Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal	21,000,000	21,437,491	21,948,917	22,584,179
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan berusaha di pusat dan di daerah				

QDB	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha K/L yang Ditetapkan Kinerjanya	564 Lembaga	564 Lembaga	564 Lembaga	0 Lembaga
	KRO Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	21,000,000	21,437,491	21,948,917	22,584,179
	INDIKATOR KRO - Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha K/L yang ditetapkan kinerjanya	564 Lembaga	564 Lembaga	564 Lembaga	
3231	KEGIATAN Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam	16,485,000	16,828,377	17,229,843	17,728,530
ABB	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal pada Sektor Sumber Daya Alam				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam	3 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	0 Kajian
	- Jumlah Percepatan Rencana proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam	3 Proyek	1 Proyek	1 Proyek	0 Proyek
PBB	- Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Sumber Daya Alam	1 Profil proyek	1 Profil proyek	1 Profil proyek	0 Profil proyek
	- Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Sumber Daya Alam	1 Proyek	1 Proyek	1 Proyek	0 Proyek
	- Jumlah Dokumen Rencana Strategis 2025-2029	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi
ABB	KRO Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	3,500,000	3,572,890	3,658,124	3,764,006
PBB	INDIKATOR KRO - Jumlah Dokumen Rencana Strategis BKPM 2025-2029	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Jumlah Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam	3 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	
	KRO Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	12,535,000	12,796,122	13,101,396	13,480,589
QDH	INDIKATOR KRO - Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Sumber Daya Alam	1 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	
	- Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Sumber Daya Alam	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	
	KRO Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	450,000	459,365	470,323	483,935
3232	INDIKATOR KRO - Percepatan Rencana proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam	3 Proyek	3 Proyek	3 Proyek	
	KEGIATAN Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	16,985,000	17,338,808	17,752,457	18,266,267
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Industri Manufaktur	3 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	0 Kajian
	- Jumlah Percepatan Rencana Proyek di Bidang Industri	3 Proyek	1 Proyek	1 Proyek	0 Proyek

ABB	Manufaktur				
	- Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Industri Manufaktur	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	0 Profil Proyek
	- Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Industri Manufaktur	1 Proyek	1 Proyek	1 Proyek	0 Proyek
	- Jumlah Kajian Background Study Rencana Umum Penanaman Modal	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	0 Kajian
ABB	KRO				
	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	4,000,000	4,083,315	4,180,730	4,301,734
	INDIKATOR KRO				
	- Jumlah Kajian Background Study Rencana Umum Penanaman Modal	1 kajian	1 kajian	1 kajian	
PBB	- Jumlah Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Industri Manufaktur	3 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	
	KRO				
	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	12,535,000	12,796,127	13,101,400	13,480,594
	INDIKATOR KRO				
QDH	- Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Industri Manufaktur	1 Profil proyek	1 Profil proyek	1 Profil proyek	
	- Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Siap Ditawarkan di Bidang Industri Manufaktur	1 Proyek	1 Proyek	1 Proyek	
	KRO				
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	450,000	459,366	470,327	483,939
3233	INDIKATOR KRO				
	- Jumlah Percepatan Rencana Proyek di Bidang Industri Manufaktur	3 Proyek	3 Proyek	3 Proyek	
	KEGIATAN				
	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan	10,190,000	10,402,236	10,650,397	10,958,657
ABB	SASARAN KEGIATAN				
	Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Jumlah Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	0 Kajian
ABB	- Jumlah Percepatan Rencana Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	2 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	0 Badan Usaha
	- Jumlah Dokumen IPRO pada Destinasi Pariwisata Strategis	2 Profil proyek	1 Profil proyek	1 Profil proyek	0 Profil proyek
	- Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Jasa dan Kawasan	1 Proyek	1 Proyek	1 Proyek	0 Proyek
	KRO				
ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1,000,000	1,020,818	1,045,172	1,075,422
	INDIKATOR KRO				
	- Jumlah Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	
	KRO				
PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	8,890,000	9,075,182	9,291,686	9,560,617
	INDIKATOR KRO				
	- Jumlah Dokumen IPRO pada Destinasi Pariwisata Strategis	2 Profil proyek	1 Profil proyek	1 Profil proyek	
	- Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Jasa dan Kawasan	1 Proyek	1 Proyek	1 Proyek	
QDH	KRO				
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	300,000	306,236	313,539	322,618
	INDIKATOR KRO				
	- Jumlah Percepatan Rencana Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	2 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	

3234	KEGIATAN Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	300,000	306,237	313,547	322,618
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah Penyelesaian Masalah Strategis di KEK	2 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	0 Badan Usaha
	KRO Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	300,000	306,237	313,547	322,618
QDH	INDIKATOR KRO - Jumlah Penyelesaian Masalah Strategis di KEK	2 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	
	KEGIATAN Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta	800,000	816,641	836,129	860,329
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek	0 Proyek
QDH	KRO Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	800,000	816,641	836,129	860,329
	INDIKATOR KRO - Jumlah Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek	
	KEGIATAN Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat	2,848,626	2,907,962	2,977,336	3,063,511
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya pelayanan penanaman modal di BKPM				
FAE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Tingkat Mutu Pelayanan di PTSP Pusat	IKM 3,45 dari	IKM 3,45 dari	IKM 3,45 dari	0 dari skala 4
	KRO Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2,848,626	2,907,962	2,977,336	3,063,511
	INDIKATOR KRO - Tingkat Mutu Pelayanan di PTSP Pusat	IKM 3,5 dari skala 4	IKM 3,45 dari skala 4	IKM 3,45 dari skala 4	
	KEGIATAN Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	10,021,254	10,229,968	10,474,019	10,777,175
5265	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal pada sektor infrastruktur				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah Percepatan Rencana Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	2 Proyek	1 Proyek	1 Proyek	0 Proyek
	- Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Infrastruktur	0 Proyek	1 Proyek	1 Proyek	1 Proyek
	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Analisa Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	0 Kajian
	- Jumlah Kajian Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	3 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	0 Kajian

	- Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	0 Profil Proyek
ABB	KRO Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1,000,000	1,020,817	1,045,172	1,075,424
	INDIKATOR KRO				
	- Jumlah Kajian Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	
PBB	KRO Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	8,621,254	8,800,824	9,010,782	9,271,584
	INDIKATOR KRO				
	- Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Infrastruktur	0 Proyek	1 Proyek	1 Proyek	
	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Analisa Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	
	- Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	
QDH	KRO Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	400,000	408,327	418,065	430,167
	INDIKATOR KRO				
	- Jumlah Percepatan Rencana Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek
6481	KEGIATAN Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	9,000,000	9,187,453	9,406,640	9,678,900
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Kepatuhan Pelaksanaan Berusaha K/L dan Pemerintah Daerah				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Jumlah pemerintah daerah yg ditingkatkan kinerjanya	100 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga
QKC	KRO Pemantauan lembaga	9,000,000	9,187,453	9,406,640	9,678,900
	INDIKATOR KRO				
	- Jumlah pemerintah daerah yg ditingkatkan kinerjanya	100 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga
6482	KEGIATAN Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal	15,383,933	15,591,114	15,838,018	16,147,589
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Jumlah konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama bilateral dan mitra kerja sama	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	0 Rekomendasi
	- Jumlah hasil perundingan kerja sama penanaman modal bilateral	19 Kesepakatan	19 Kesepakatan	19 Kesepakatan	0 Kesepakatan
	- Jumlah kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dalam dan luar negeri	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	0 Kesepakatan
	- Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan kesepakatan dan implementasi kerja sama bilateral di bidang penanaman modal	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
PBB	KRO Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	10,250,000	10,350,253	10,472,126	10,626,395
	INDIKATOR KRO				
	- Jumlah konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama bilateral dan mitra kerja sama	19 Rekomendasi Kebijakan	19 Rekomendasi Kebijakan	19 Rekomendasi Kebijakan	
	- Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan kesepakatan dan implementasi kerja sama bilateral di bidang penanaman modal	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	

PEC	KRO Kerja sama	5,133,933	5,240,861	5,365,892	5,521,194
	INDIKATOR KRO - Jumlah hasil perundingan kerja sama penanaman modal bilateral - Jumlah kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dalam dan luar negeri	19 Kesepakatan 4 Kesepakatan	19 Kesepakatan 4 Kesepakatan	19 Kesepakatan 4 Kesepakatan	
6483	KEGIATAN Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan kesepakatan dan implementasi kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal - Jumlah konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama regional dan multilateral - Jumlah Forum Fasilitasi Outward Investment - Jumlah hasil perundingan kerja sama penanaman modal regional dan multilateral	16,293,760 1 Rekomendasi 20 Rekomendasi 6 Forum 20 Kesepakatan	16,500,747 1 Rekomendasi 13 Rekomendasi 1 Forum 13 Kesepakatan	16,748,225 1 Rekomendasi 13 Rekomendasi 1 Forum 13 Kesepakatan	17,059,005 1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 0 Forum 0 Kesepakatan
PBB	KRO Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	7,400,000	7,425,046	7,459,619	7,505,869
	INDIKATOR KRO - Jumlah konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama regional dan multilateral	20 Rekomendasi Kebijakan	13 Rekomendasi Kebijakan	13 Rekomendasi Kebijakan	
PEB	KRO Forum	1,200,000	1,224,948	1,254,180	1,290,479
	INDIKATOR KRO - Jumlah Forum Fasilitasi Outward Investment	6 Forum	1 Forum	1 Forum	
PEC	KRO Kerja sama	7,693,760	7,850,753	8,034,426	8,262,657
	INDIKATOR KRO - Jumlah hasil perundingan kerja sama penanaman modal regional dan multilateral	20 Kesepakatan	13 Kesepakatan	13 Kesepakatan	
6777	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko SASARAN KEGIATAN Meningkatnya pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah Pelaku Usaha yang Diberikan Layanan Informasi Penanaman Modal	40,868,574 400000 orang	41,718,438 400000 orang	42,712,003 400000 orang	43,946,180 400000 orang
BMB	KRO Komunikasi Publik	40,868,574	41,718,438	42,712,003	43,946,180
	INDIKATOR KRO - Jumlah Pelaku Usaha yang Diberikan Layanan Informasi Penanaman Modal	400000 orang	400000 orang	400000 orang	400000 orang
6778	KEGIATAN Promosi Wilayah Amerika dan Eropa	28,195,304	28,782,686	29,469,349	30,322,272

	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya jumlah awareness, minat dan rencana investasi di Wilayah Amerika dan Eropa <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Amerika dan Eropa - Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Amerika dan Eropa - Jumlah Minat Investasi melalui kegiatan dalam forum Internasional di Wilayah Amerika dan Eropa - Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Promosi Investasi di Kawasan Strategis Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa	353,4 Triliun (Rp)	353,4 Triliun (Rp)	353,4 Triliun (Rp)	353,4 Triliun (Rp)
		100 Minat	100 Minat	100 Minat	100 Minat
		960 Minat	960 Minat	960 Minat	960 Minat
		100 Minat	100 Minat	100 Minat	100 Minat
PEG	<u>KRO</u> Konferensi dan Event	13,720,721	14,006,565	14,340,717	14,755,776
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Minat Investasi melalui kegiatan dalam forum Internasional di Wilayah Amerika dan Eropa	960 Minat Investasi	960 Minat Investasi	960 Minat Investasi	960 Minat Investasi
PEH	<u>KRO</u> Promosi	14,474,583	14,776,121	15,128,632	15,566,496
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Amerika dan Eropa - Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Promosi Investasi di Kawasan Strategis Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa - Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Amerika dan Eropa	100 Minat Investasi	100 Minat Investasi	100 Minat Investasi	100 Minat Investasi
		100 Minat Investasi	100 Minat Investasi	100 Minat Investasi	100 Minat Investasi
		353,4 Triliun (Rp)	353,4 Triliun (Rp)	353,4 Triliun (Rp)	353,4 Triliun (Rp)
6779	<u>KEGIATAN</u> Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	9,380,270	9,575,663	9,804,105	10,087,864
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya jumlah awareness, minat dan rencana investasi di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika - Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika - Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Forum Internasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika - Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Promosi Investasi di Kawasan Strategis Nasional IKN di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	820,7 Triliun (Rp)	820,7 Triliun (Rp)	820,7 Triliun (Rp)	820,7 Triliun (Rp)
		2542 Minat	2542 Minat	2542 Minat	2542 Minat
		100 Minat	100 Minat	100 Minat	100 Minat
		50 Minat Investasi	50 Minat Investasi	50 Minat Investasi	50 Minat Investasi
PEG	<u>KRO</u> Konferensi dan Event	2,582,010	2,635,795	2,698,676	2,776,784
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Minat Investasi melalui kegiatan dalam forum Internasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	100 Minat Investasi	100 Minat Investasi	100 Minat Investasi	100 Minat Investasi

PEH	<u>KRO</u> Promosi	6,798,260	6,939,868	7,105,429	7,311,080
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	- Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	2542 Minat Investasi	2542 Minat Investasi	2542 Minat Investasi	2542 Minat Investasi
	- Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Promosi Investasi di Kawasan Strategis Nasional IKN di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	50 Minat Investasi	50 Minat Investasi	50 Minat Investasi	50 Minat Investasi
6780	- Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	820,7 Triliun (Rp)	820,7 Triliun (Rp)	820,7 Triliun (Rp)	820,7 Triliun (Rp)
	<u>KEGIATAN</u> Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	6,662,197	6,800,971	6,963,216	7,164,753
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya jumlah awareness, minat dan rencana investasi di Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	891,4 Triliun (Rp)	891,4 Triliun (Rp)	891,4 Triliun (Rp)	891,4 Triliun (Rp)
	- Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	2065 Minat	2065 Minat	2065 Minat	2065 Minat
	- Jumlah Minat melalui kegiatan dalam forum Internasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	615 Minat	615 Minat	615 Minat	615 Minat
	- Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Promosi Investasi di Kawasan Strategis Nasional IKN di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	245 Minat	245 Minat	245 Minat	245 Minat
	<u>KRO</u> Konferensi dan Event	1,402,494	1,431,705	1,465,862	1,508,290
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
PEG	- Jumlah Minat Investasi melalui kegiatan dalam forum Internasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	615 Minat Investasi	615 Minat Investasi	615 Minat Investasi	615 Minat Investasi
	<u>KRO</u> Promosi	5,259,703	5,369,266	5,497,354	5,656,463
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	- Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	2065 Minat Investasi	2065 Minat Investasi	2065 Minat Investasi	2065 Minat Investasi
PEH	- Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Promosi Investasi di Kawasan Strategis Nasional IKN di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	245 Minat Investasi	245 Minat Investasi	245 Minat Investasi	245 Minat Investasi
	- Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	891,4 Triliun (Rp)	891,4 Triliun (Rp)	891,4 Triliun (Rp)	891,4 Triliun (Rp)
	<u>KEGIATAN</u> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V	41,511,953	42,376,734	43,387,705	44,643,460
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya realisasi penanaman modal di Wilayah V (Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Papua Barat)				

	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Wilayah V - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah V - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah V - Jumlah Penanganan Kasus dalam rangka Percepatan Investasi - Jumlah Laporan Verifikasi Pelaksanaan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko - Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal <u>KRO</u> BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	99 Triliun (Rp)	99 Triliun (Rp)	99 Triliun (Rp)	99 Triliun (Rp)
		30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	0 Badan Usaha
		11 Badan Usaha	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	0 Badan Usaha
		18 Layanan	18 Layanan	18 Layanan	0 Layanan
		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0 Laporan
		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan
		917,966	937,086	959,441	987,210
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah V <u>KRO</u> BMA Data dan Informasi Publik	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	
		1,383,047	1,411,842	1,445,527	1,487,362
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Wilayah V <u>KRO</u> FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	99 Triliun (Rp)	99 Triliun (Rp)	99 Triliun (Rp)	99 Triliun (Rp)
		24,000,000	24,499,984	25,084,472	25,810,483
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Jumlah Laporan Verifikasi Pelaksanaan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko <u>KRO</u> QAH Pelayanan Publik Lainnya	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
		15,000,000	15,312,494	15,677,800	16,131,557
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Penanganan Kasus dalam rangka Percepatan Investasi <u>KRO</u> QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	18 Layanan	18 Layanan	18 Layanan	
		210,940	215,328	220,465	226,848
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah V <u>KEGIATAN</u> 6782 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	11 Badan Usaha	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Layanan Perizinan Berusaha Sektor Industri - Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian NIB Kepada Pelaku Usaha	23,500,000	23,989,557	24,561,869	25,272,753
		100000 Badan	55.000 Badan	55.000 Badan	55.000 Badan
		0 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	0 Kegiatan

AEG	<u>KRO</u> Konferensi dan Event	20,000,000	20,416,654	20,903,729	21,508,737
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian NIB Kepada Pelaku Usaha	0 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	
BAC	<u>KRO</u> Pelayanan Publik kepada badan usaha	3,500,000	3,572,903	3,658,140	3,764,016
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Layanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	100000 Badan Usaha	55.000 Badan Usaha	55.000 Badan Usaha	55.000 Badan Usaha
6783	<u>KEGIATAN</u> Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	4,000,000	4,083,310	4,180,719	4,301,723
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Layanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	97500 Badan	50000 Badan	50000 Badan	0 Badan Usaha
	- Jumlah Layanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri di Luar OSS	2500 Badan	2500 Badan	2500 Badan	0 Badan usaha
BAC	<u>KRO</u> Pelayanan Publik kepada badan usaha	4,000,000	4,083,310	4,180,719	4,301,723
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Layanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	97500 Badan Usaha	50000 Badan Usaha	50000 Badan Usaha	50000 Badan Usaha
	- Jumlah Layanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri di Luar OSS	2500 Badan Usaha	2500 Badan Usaha	2500 Badan Usaha	2500 Badan Usaha
	<u>KEGIATAN</u> Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi	44,931,990	45,867,923	46,962,184	48,321,407
6784	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Peta Peluang Hilirisasi Investasi Strategis/ Downstream Investment Project Profile (DIPP) di Sektor Minyak dan Gas Bumi	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
	- Jumlah Peta Peluang Hilirisasi Investasi Strategis/ Downstream Investment Project Profile (DIPP) di Sektor Mineral dan Batubara	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
	- Jumlah Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	0 Badan Usaha
	- Jumlah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	0 Rekomendasi
	- Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi
	- Jumlah Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	0 Badan Usaha
	- Jumlah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	0 Rekomendasi
	- Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Minyak dan Gas Bumi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi
	- Jumlah Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	0 Badan Usaha
	- Jumlah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	0 Rekomendasi
	- Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Mineral dan Batubara	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi
	- Jumlah Peta Peluang Hilirisasi Investasi Strategis/Downstream Investment Project Profile (DIPP) di Sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

ABB	KRO Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	37,431,990	38,211,745	39,123,355	40,255,696
	INDIKATOR KRO - Jumlah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara - Jumlah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi - Jumlah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan - Jumlah Peta Peluang Hilirisasi Investasi Strategis/ Downstream Investment Project Profile (DIPP) di Sektor Mineral dan Batubara - Jumlah Peta Peluang Hilirisasi Investasi Strategis/ Downstream Investment Project Profile (DIPP) di Sektor Minyak dan Gas Bumi - Jumlah Peta Peluang Hilirisasi Investasi Strategis/Downstream Investment Project Profile (DIPP) di Sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	2 Rekomendasi Kebijakan 2 Rekomendasi Kebijakan 4 Rekomendasi Kebijakan 0 Rekomendasi Kebijakan 0 Rekomendasi Kebijakan 0 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan 2 Rekomendasi Kebijakan 4 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan 2 Rekomendasi Kebijakan 4 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan 2 Rekomendasi Kebijakan 4 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan
PBB	KRO Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	4,500,000	4,593,710	4,703,299	4,839,429
	INDIKATOR KRO - Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Mineral dan Batubara - Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Minyak dan Gas Bumi - Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan
QDH	KRO Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	3,000,000	3,062,468	3,135,530	3,226,282
	INDIKATOR KRO - Jumlah Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara - Jumlah Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi - Jumlah Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	5 Badan usaha 5 badan usaha 5 Badan usaha	5 Badan usaha 5 badan usaha 5 Badan usaha	5 Badan usaha 5 badan usaha 5 Badan usaha	5 Badan usaha 5 badan usaha 5 Badan usaha
6785	KEGIATAN Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	116,576,234	116,689,653	116,916,627	117,257,846
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	0 Sistem
UAB	KRO Sistem Informasi Pemerintahan	116,576,234	116,689,653	116,916,627	117,257,846
	INDIKATOR KRO - Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	
6786	KEGIATAN Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan	49,456,473	50,406,593	51,520,581	52,906,362
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya kualitas Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah Pengembangan Website Penanaman Modal - Jumlah pemeliharaan data center dan DRC yang mendukung OSS	1 Sistem 1 Sistem	1 Sistem 1 Sistem	1 Sistem 1 Sistem	0 Sistem 0 Sistem

ABO	- Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Elektronik Infrastruktur dan Jaringan KRO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	3 dari skala 5 3,6 dari skala 4 4,500,000	3 dari skala 5 3,6 dari skala 4 4,593,738	3 dari skala 5 3,6 dari skala 4 4,703,329	0 dari skala 5 3,6 dari skala 4 4,839,456
	INDIKATOR KRO - Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KRO Sistem Informasi Pemerintahan	3 dari skala 5 12,836,473	3 dari skala 5 13,023,707	3 dari skala 5 13,245,863	3 dari skala 5 13,523,867
QMA	- Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Elektronik Infrastruktur dan Jaringan KRO Data dan Informasi Publik	3,6 dari Skala 4 Indeks 1,500,000	3,6 dari Skala 4 Indeks 1,531,242	3,6 dari Skala 4 Indeks 1,567,771	3,6 dari Skala 4 Indeks 1,613,150
	INDIKATOR KRO - Jumlah Pengembangan Website Penanaman Modal KRO Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem informasi 30,620,000	1 Sistem informasi 31,257,906	1 Sistem informasi 32,003,618	1 Sistem informasi 32,929,889
6787	- Jumlah pemeliharaan data center dan DRC yang mendukung OSS KEGIATAN Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	1 Sistem Informasi 6,364,768	1 Sistem Informasi 6,497,337	1 Sistem Informasi 6,652,341	1 Sistem Informasi 6,844,881
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Sistem 6,364,768	1 Sistem 6,497,337	1 Sistem 6,652,341	0 Sistem 6,844,881
FAB	KRO Sistem Informasi Pemerintahan INDIKATOR KRO - Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	0 Sistem
FAB	KRO Sistem Informasi Pemerintahan INDIKATOR KRO - Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	6,364,768	6,497,337	6,652,341	6,844,881
	INDIKATOR KRO - Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	0 Sistem
WA	Program Program Dukungan Manajemen	419,063,840	427,721,889	437,846,605	450,424,608
	Sasaran Program Terwujudnya ASN BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas Indikator Kinerja Program Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	77,5%	77,5%		
	Sasaran Program Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien Indikator Kinerja Program Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM	A / (>80%-90%) 3	A / (>80%-90%) 3		
	Sasaran Program Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel				

	Indikator Kinerja Program Nilai kinerja anggaran BKPM	Baik / (>80%	Baik / (>80%		
3204	KEGIATAN Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM	3,000,000	3,062,443	3,135,512	3,226,260
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya kepatuhan pegawai dan institusi BKPM terhadap peraturan perundang-undangan				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Nilai Internal Audit Capability Model	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	0 Nilai
EBD	KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,000,000	3,062,443	3,135,512	3,226,260
	INDIKATOR KRO - Nilai Internal Audit Capability Model	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	
3205	KEGIATAN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal	313,215,496	319,653,332	327,182,896	336,537,771
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Penyusunan laporan keuangan - Renovasi Gedung dan Bangunan - Jumlah Peralatan Fasilitas Perkantoran - Indeks kepuasan pengguna layanan SDM - Persentase utilisasi aset K/L - Indeks Kepuasan Layanan Umum - Indeks penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi - Indeks kepuasan pengguna layanan umum	100 Unit 1 Layanan 2 Laporan 4449,4 m2 136 unit 3,5 Skala (5) 100 % 3,75 Skala (5) 3,75 Skala (5) 3,75 Skala (5)	100 Unit 1 Layanan 2 Laporan 3485 m2 56 unit 3,5 Skala (5) 100 % 3,75 Skala (5) 3,75 Skala (5) 3,75 Skala (5)	100 Unit 1 Layanan 2 Laporan 3485 m2 56 unit 3,5 Skala (5) 100 % 3,75 Skala (5) 3,75 Skala (5) 3,75 Skala (5)	100 Unit 0 Layanan 0 Laporan 0 m2 0 unit 0 Skala (5) 0 % 0 Skala (5) 0 Skala (5) 0 Skala (5)
EBA	KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal	274,789,013	280,426,351	287,020,080	295,212,542
	INDIKATOR KRO - Indeks Kepuasan Layanan Umum - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Persentase utilisasi aset K/L	3,75 Skala (5) 1 Layanan 100 Persen (%)	3,75 Skala (5) 1 Layanan 100 Persen (%)	3,75 Skala (5) 1 Layanan 100 Persen (%)	
EBB	KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30,260,080	30,890,492	31,627,437	32,542,818
	INDIKATOR KRO - Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Jumlah Peralatan Fasilitas Perkantoran - Renovasi Gedung dan Bangunan	100 Unit 136 unit 4449,4 m2	100 Unit 136 unit 4449,4 m2	100 Unit 136 unit 4449,4 m2	
EBC	KRO Layanan Manajemen SDM Internal	2,940,400	3,001,639	3,073,252	3,162,195
	INDIKATOR KRO - Indeks kepuasan pengguna layanan SDM	3,5 Skala (5)	3,5 Skala (5)	3,5 Skala (5)	

EBD	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,226,003	5,334,850	5,462,127	5,620,216
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Indeks penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi - Penyusunan laporan keuangan	3,75 Skala (5) 2 Laporan	3,75 Skala (5) 2 Laporan	3,75 Skala (5) 2 Laporan	
3208	<u>KEGIATAN</u> Pengembangan Sumber Daya Manusia	20,000,000	20,416,570	20,903,641	21,508,658
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatkan kualitas aparatur BKPM dan aparatur daerah bidang penanaman modal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penanaman Modal Internal dan Eksternal - Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Struktural dan Teknis Internal	1500 Orang 300 Orang	1400 Orang 200 Orang	1400 Orang 200 Orang	0 Orang 0 Orang
DCF	<u>KRO</u> Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5,600,000	5,716,618	5,852,995	6,022,403
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penanaman Modal Internal dan Eksternal	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	
EBC	<u>KRO</u> Layanan Manajemen SDM Internal	14,400,000	14,699,952	15,050,646	15,486,255
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Struktural dan Teknis Internal	300 orang	400 orang	400 orang	
3210	<u>KEGIATAN</u> Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM	9,147,713	9,338,263	9,561,042	9,837,767
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran BKPM				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi - Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	8 Dokumen 18 Dokumen	8 Dokumen 6 Dokumen	8 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen
EBD	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	9,147,713	9,338,263	9,561,042	9,837,767
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi - Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	8 Dokumen 18 Dokumen	8 Dokumen 6 Dokumen	8 Dokumen 6 Dokumen	
6774	<u>KEGIATAN</u> Penyempurnaan Produk Hukum dan Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal	29,225,950	29,850,118	30,579,225	31,484,477
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum penanaman modal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan - Indeks ketepatan waktu penyelesaian telaahan hukum	2,7 Skala 4 2,8 Skala 4	2,7 Skala 4 2,8 Skala 4	2,7 Skala 4 2,8 Skala 4	0 Skala 4 0 Skala 4

EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	29,225,950	29,850,118	30,579,225	31,484,477
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan - Indeks ketepatan waktu penyelesaian telaahan hukum	2,7 skala 4 2,8 Skala 4	2,7 skala 4 2,8 Skala 4	2,7 skala 4 2,8 Skala 4	
6775	<u>KEGIATAN</u> Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat <u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya pelayanan hubungan masyarakat <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Presentase opini negatif pemberitaan K/L pada media	13,000,000 30 persen	13,270,798 30 persen	13,587,395 30 persen	13,980,659 0 persen
EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	13,000,000	13,270,798	13,587,395	13,980,659
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Presentase opini negatif pemberitaan K/L pada media	30 Persentase	30 Persentase	30 Persentase	
6776	<u>KEGIATAN</u> Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Tata Usaha <u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan dan Tata Usaha <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks ketepatan waktu persiapan pelayanan keprotokoleran pimpinan - Indeks Kepuasan Layanan Umum	31,474,681 2,7 skala 4 3,75 skala 5	32,130,365 2,7 skala 4 3,75 skala 5	32,896,894 2,7 skala 4 3,75 skala 5	33,849,016 0 skala 4 0 skala 5
EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	30,000,000	30,624,978	31,355,596	32,263,103
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Indeks ketepatan waktu persiapan pelayanan keprotokoleran pimpinan	2,7 Skala 4	2,7 Skala 4	2,7 Skala 4	
EBD	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,474,681	1,505,387	1,541,298	1,585,913
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Indeks Kepuasan Layanan Umum	3,7 Skala 5	3,7 Skala 5	3,7 Skala 5	

F. RINCIAN BIAYA	
JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2024
1	2
Eselon 1	
065.01-2024 - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	1,229,295,942
1. KELOMPOK BIAYA	
NON_OPERASIONAL	963,486,929
OPERASIONAL	265,809,013

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2024
1	2
<u>2. JENIS BELANJA</u>	
BELANJA PEGAWAI	163,719,525
BELANJA MODAL	137,366,184
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA LAIN-LAIN	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA BARANG DAN BARANG	928,210,233
BELANJA HIBAH	0
<u>3. SUMBER DANA</u>	
RM	1,229,295,942
PINJ. VALAS	0
HDN	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SA-BLU	0
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
L.COST/RMP	0
STM	0
RPLN	0
PDN	0
HDN LANGSUNG	0
SBSN-PBS	0
BLU	0
HIBAH VALAS	0
PNBP	0

<u>1. TOTAL KELOMPOK BIAYA K/L</u>	
NON_OPERASIONAL	963,486,929
OPERASIONAL	265,809,013
<u>2. TOTAL JENIS BELANJA K/L</u>	
BELANJA BARANG DAN BARANG	928,210,233
BELANJA PEGAWAI	163,719,525
BELANJA MODAL	137,366,184
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA LAIN-LAIN	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA HIBAH	0
<u>3. TOTAL SUMBER DANA K/L</u>	
RM	1,229,295,942
PINJ. VALAS	0
HDN	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SA-BLU	0
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
L.COST/RMP	0
STM	0
RPLN	0
PDN	0
HDN LANGSUNG	0
SBSN-PBS	0
BLU	0
HIBAH VALAS	0
PNBP	0

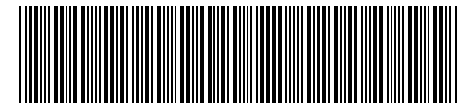
G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN.

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	2024	2025	2026	2027
	TOTAL	a. Perpajakan b. PNBP				

Jakarta, 23/9/2026



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA-065.01-0/2024**



DS:0608-5065-7345-3300

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 065 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 065.01 Badan Koordinasi Penanaman Modal |
| 3. PAGU | : | Rp.1.229.295.942.000 |
- (SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

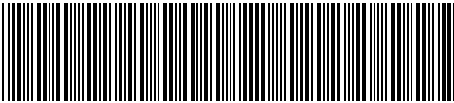
Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	065	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI	:	01	Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. PAGU	:	Rp.1.229.295.942.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)	

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	:	065.01.ED	Program Penanaman Modal	810.232.102
		065.01.WA	Program Dukungan Manajemen	419.063.840
2. SASARAN STRATEGIS K/L	:	01	Meningkatnya realisasi penanaman modal	
	:	02	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	
	:	03	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	
3. FUNGSI	:	04	EKONOMI	1.229.295.942
SUB FUNGSI	:	0490	EKONOMI LAINNYA	1.229.295.942
4. PRIORITAS NASIONAL	:	01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	529.298.949
NON PRIORITAS NASIONAL	:			699.996.993



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 12

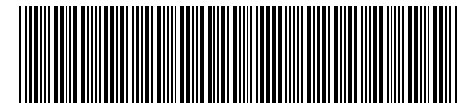
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
065.01.ED	Program Penanaman Modal		810.232.102
SP01	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal		
IKP01	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal	4,0 Indeks (skala 5)	
SP02	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal		
IKP01	Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (starting a business)	3/3 Hari/Prosedur	
IKP02	Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM	205 Perusahaan	
SP03	Meningkatnya kualitas kerjasama penanaman modal		
IKP01	Kesepakatan/perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	69 Kesepakatan/perjanjian/perundi	
SP04	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal		
IKP01	Jumlah Minat Penanaman Modal	9.100 Minat	
IKP02	Nilai Komitmen Penanaman Modal	2.065,5 Triliun (Rp)	
SP05	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal		
IKP01	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	3,50 Indeks (skala 4)	
SP06	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal		
IKP01	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking)	143 Perusahaan	
SP09	Meningkatnya pelayanan informasi perizinan berusaha berbasis resiko		
IKP01	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan informasi perizinan berusaha berbasis resiko	3 indeks	
3213	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal		26.840.000
01.01	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha	2 Usulan rekomendasi	
01.02	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2 Usulan rekomendasi	
01.03	Jumlah Usulan Rekomendasi Terkait Sinkronisasi Kebijakan Investasi	1 Usulan Rekomendasi	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 12

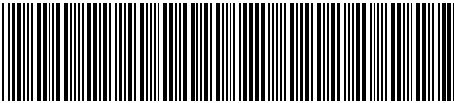
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
3214	01.04 Jumlah Usulan Rekomendasi terkait Kebijakan Ekosistem Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing	1	Usulan Rekomendasi	2.952.967
	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah			
3215	01.01 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah	38	Daerah	26.000.000
	Pemberdayaan Usaha Nasional			
	01.01 Jumlah Kemitraan Usaha Nasional	1000	Kemitraan	
	01.02 Jumlah Data Perusahaan PMA/PMDN Yang Wajib Bermitra Dan Pelaku UMKM Di Daerah Yang Siap Dimitrakan	1	Paket Buku	
	01.03 Jumlah Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Nasional	1000	UMKM	
	01.04 Jumlah Fasilitasi bagi Pelaku UMKM dalam Rantai Pasok	500	UMKM	
3216	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal			171.071.372
	01.01 Jumlah Analisis Market Intelligence Negara dan Sektor Prioritas Promosi Investasi	1	Laporan	
	01.02 Jumlah Kegiatan Regional Investment Forum	1	Kegiatan	
	01.03 Jumlah Bahan-Bahan Informasi Potensi Penanaman Modal	7	Layanan	
	01.04 Jumlah Analisis Negara Target dan Negara Pesaing	2	Kajian	
	01.05 Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center)	2323	Minat Investasi	
	01.06 Jumlah Perusahaan Asing yang berhasil difasilitasi untuk melakukan relokasi dan diversifikasi ke Indonesia	11	Perusahaan	
3225	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha			8.750.000
	01.01 Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas Berusaha terkait Masterlist	200	Badan Usaha	
	01.02 Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas Berusaha terkait Tax Allowance	18	Badan usaha	
	01.03 Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas Berusaha terkait Tax Holiday	18	Badan Usaha	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



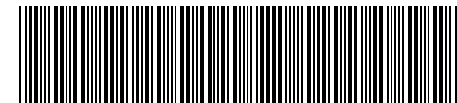
DS:0608-5065-7345-3300

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :			(dalam ribuan rupiah)	
KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
3226	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I			38.241.727
	01.01 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah I	297	Triliun (Rp)	
	01.02 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah I	14	Badan Usaha	
	01.03 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah I	15	Badan Usaha	
	01.04 Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi	40	Badan Usaha	
	01.05 Jumlah Badan Usaha yang Menerima Fasilitas Penanaman Modal	30	Badan Usaha	
	01.06 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN	2	Badan Usaha	
3227	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II			19.251.521
	01.01 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah II	354,74	Triliun (Rp)	
	01.02 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah II	15	Badan Usaha	
	01.03 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah II	25	Badan Usaha	
	01.04 Jumlah Badan Usaha Investasi Besar Bermitra dengan UMKM	31	Badan Usaha	
3228	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III			7.049.356
	01.01 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah III	577,51	Triliun (Rp)	
	01.02 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah III	30	Badan Usaha	
	01.03 Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah III	20	Badan Usaha	
	01.04 Jumlah Badan Usaha dalam rangka Eksekusi Realisasi Investasi pada proyek yang terkendala di Wilayah Barat	1	Badan Usaha	
3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV			19.319.823
	01.01 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah IV	321,75	Triliun (Rp)	
	01.02 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah IV	35	Badan Usaha	
	01.03 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV	20	Badan Usaha	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 5 dari 12

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
3230	01.04 Jumlah Lembaga yang Menerima Dana Dekonsentrasi Pemantauan Realisasi Investasi	34	Lembaga	21.000.000
	01.05 Jumlah Badan Usaha dalam rangka Eksekusi Realisasi Investasi pada proyek yang terkendala di Wilayah Timur	1	Badan Usaha	
	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal			
3231	01.01 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksaaan Berusaha K/L yang Ditetapkan Kinerjanya	564	Lembaga	16.485.000
	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam			
	01.01 Jumlah Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam	1	Kajian	
	01.02 Jumlah Percepatan Rencana proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam	3	Proyek	
	01.03 Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Sumber Daya Alam	1	Profil proyek	
	01.04 Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Sumber Daya Alam	3	Proyek	
	01.05 Jumlah Dokumen Rencana Strategis 2025-2029	1	Rekomendasi Kebijakan	
3232	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur			16.985.000
	01.01 Jumlah Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Industri Manufaktur	1	Kajian	
	01.02 Jumlah Percepatan Rencana Proyek di Bidang Industri Manufaktur	3	Proyek	
	01.03 Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Industri Manufaktur	1	Profil Proyek	
	01.04 Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Industri Manufaktur	3	Proyek	
	01.05 Jumlah Kajian Background Study Rencana Umum Penanaman Modal	1	Kajian	
3233	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan			10.190.000
	01.01 Jumlah Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	1	Kajian	
	01.02 Jumlah Percepatan Rencana Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	2	Badan Usaha	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 6 dari 12

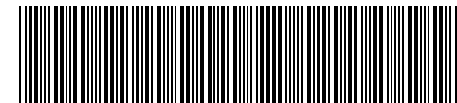
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
3234	01.03 Jumlah Dokumen IPRO pada Destinasi Pariwisata Strategis	2	Profil proyek	
	01.04 Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Jasa dan Kawasan	2	Proyek	
	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)			300.000
5089	01.01 Jumlah Penyelesaian Masalah Strategis di KEK	2	Badan Usaha	
	Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta			800.000
	01.01 Jumlah Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	2	Proyek	
5264	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat			2.848.626
	01.01 Tingkat Mutu Pelayanan di PTSP Pusat	IKM 3,45	dari skala 4	
	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur			10.021.254
5265	01.01 Jumlah Kajian Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	1	Kajian	
	01.02 Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur	1	Profil Proyek	
	01.03 Jumlah Percepatan Rencana Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	2	Proyek	
	01.04 Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Infrastruktur	2	Proyek	
	01.05 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Analisa Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur	1	Kajian	
	Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha			9.000.000
6481	01.01 Jumlah pemerintah daerah yg ditingkatkan kinerjanya	100	Lembaga	
	Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal			15.383.933
	01.01 Jumlah konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama bilateral dan mitra kerja sama	19	Rekomendasi Kebijakan	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 7 dari 12

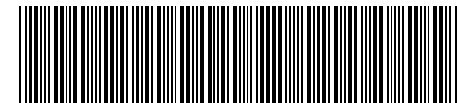
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
6483	01.02 Jumlah hasil perundingan kerja sama penanaman modal bilateral	19	Kesepakatan	16.293.760
	01.03 Jumlah kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dalam dan luar negeri	4	Kesepakatan	
	01.04 Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan kesepakatan dan implementasi kerja sama bilateral di bidang penanaman modal	1	Rekomendasi Kebijakan	
	Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal			
6777	01.01 Jumlah konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama regional dan multilateral	20	Rekomendasi Kebijakan	40.868.574
	01.02 Jumlah Forum Fasilitasi Outward Investment	6	Forum	
	01.03 Jumlah hasil perundingan kerja sama penanaman modal regional dan multilateral	20	Kesepakatan	
	01.04 Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan kesepakatan dan implementasi kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal	1	Rekomendasi Kebijakan	
6778	Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			28.195.304
	01.01 Jumlah Pelaku Usaha yang Diberikan Layanan Informasi Penanaman Modal	400000	orang	
6779	Promosi Wilayah Amerika dan Eropa			9.380.270
	01.01 Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Amerika dan Eropa	353,4	Triliun (Rp)	
	01.02 Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Amerika dan Eropa	100	Minat investasi	
	01.03 Jumlah Minat Investasi melalui kegiatan dalam forum Internasional di Wilayah Amerika dan Eropa	960	Minat Investasi	
	01.04 Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Promosi Investasi di Kawasan Strategis Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa	100	Minat Investasi	
6779	Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika			9.380.270
	01.01 Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	820,7	Triliun (Rp)	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 8 dari 12

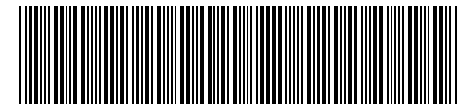
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
6780	01.02 Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	2542	Minat Investasi	6.662.197
	01.03 Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Forum Internasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	100	Minat Investasi	
	01.04 Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Promosi Investasi di Kawasan Strategis Nasional IKN di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	50	Minat Investasi	
	Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik			
6781	01.01 Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	891,4	Triliun (Rp)	41.511.953
	01.02 Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	2065	Minat Investasi	
	01.03 Jumlah Minat melalui kegiatan dalam forum Internasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	615	Minat Investasi	
	01.04 Jumlah Minat Investasi Melalui Kegiatan Promosi Investasi di Kawasan Strategis Nasional IKN di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	245	Minat Investasi	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V			
	01.01 Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Wilayah V	99	Triliun (Rp)	
	01.02 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah V	30	Badan Usaha	
6782	01.03 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah V	5	Badan Usaha	23.500.000
	01.04 Jumlah Penanganan Kasus dalam rangka Percepatan Investasi	18	Layanan	
	01.05 Jumlah Laporan Verifikasi Pelaksanaan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko	3	Laporan	
	01.06 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3	Laporan	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri			
	01.01 Jumlah Layanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	55.000	Badan Usaha	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 9 dari 12

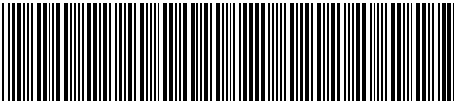
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
6783	01.02 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian NIB Kepada Pelaku Usaha	6	Kegiatan	4.000.000
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri			
	01.01 Jumlah Layanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	50000	Badan Usaha	
6784	01.02 Jumlah Layanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri di Luar OSS	2500	Badan usaha	44.931.990
	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi			
	01.01 Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	5	Badan Usaha	
	01.02 Jumlah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	4	Rekomendasi Kebijakan	
	01.03 Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	1	Rekomendasi Kebijakan	
	01.04 Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi	5	Badan Usaha	
	01.05 Jumlah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi	2	Rekomendasi Kebijakan	
	01.06 Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Minyak dan Gas Bumi	1	Rekomendasi Kebijakan	
	01.07 Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara	5	Badan Usaha	
	01.08 Jumlah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara	2	Rekomendasi Kebijakan	
	01.09 Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Mineral dan Batubara	1	Rekomendasi Kebijakan	
	01.10 Jumlah Peta Peluang Hilirisasi Investasi Strategis/Downstream Investment Project Profile (DIPP) di Sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	1	Rekomendasi Kebijakan	
	01.11 Jumlah Peta Peluang Hilirisasi Investasi Strategis/ Downstream Investment Project Profile (DIPP) di Sektor Minyak dan Gas Bumi	1	Rekomendasi Kebijakan	
6785	01.12 Jumlah Peta Peluang Hilirisasi Investasi Strategis/ Downstream Investment Project Profile (DIPP) di Sektor Mineral dan Batubara	1	Rekomendasi Kebijakan	116.576.234
	Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
	01.01 Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	1	Sistem Informasi	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :				(dalam ribuan rupiah)
KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
6786	Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan			49.456.473
	01.01	Jumlah Pengembangan Website Penanaman Modal	1 Sistem Informasi	
	01.02	Jumlah pemeliharaan data center dan DRC yang mendukung OSS	1 Sistem Informasi	
	01.03	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3 dari skala 5	
6787	Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal			6.364.768
	01.04	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Elektronik Infrastruktur dan Jaringan	3,6 dari skala 4	
	01.01	Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	1 Sistem Informasi	
065.01.WA	Program Dukungan Manajemen			419.063.840
SP01	Terwujudnya ASN BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas			
IKP01	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		77,5% Indeks	
SP02	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien			
IKP01	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		A / (>80%-90%) Predikat/Nilai	
IKP02	Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM		3 Level	
SP03	Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel			
IKP01	Nilai kinerja anggaran BKPM		Baik / (>80%-90%) Predikat / Nilai	
3204	Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM			3.000.000
01.01	Nilai Internal Audit Capability Model		3 Nilai	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 11 dari 12

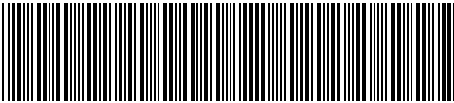
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
3205	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal			313.215.496
	01.01 Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	100	Unit	
	01.02 Indeks kepuasan pengguna layanan SDM	3,5	Skala (5)	
	01.03 Penyusunan laporan keuangan	2	Laporan	
	01.04 Persentase utilisasi aset K/L	100	%	
	01.05 Indeks penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	3,75	Skala (5)	
	01.06 Indeks kepuasan pengguna layanan umum	3,75	Skala (5)	
	01.07 Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	
	01.08 Indeks Kepuasan Layanan Umum	3,75	Skala (5)	
	01.09 Jumlah Peralatan Fasilitas Perkantoran	136	unit	
	01.10 Renovasi Gedung dan Bangunan	4449,4	m2	
3208	Pengembangan Sumber Daya Manusia			20.000.000
	01.01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Struktural dan Teknis Internal	400	Orang	
	01.02 Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penanaman Modal Internal dan Eksternal	1500	Orang	
3210	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM			9.147.713
	01.01 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	6	Dokumen	
	01.02 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	8	Dokumen	
6774	Penyempurnaan Produk Hukum dan Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal			29.225.950
	01.01 Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan	2,7	Skala 4	
	01.02 Indeks ketepatan waktu penyelesaian telaahan hukum	2,8	Skala 4	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
6775	Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat		13.000.000
01.01	Presentase opini negatif pemberitaan K/L pada media	30 persen	
6776	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Tata Usaha		31.474.681
01.01	Indeks ketepatan waktu persiapan pelayanan keprotokoleran pimpinan	2,7 skala 4	
01.02	Indeks Kepuasan Layanan Umum	3,75 skala 5	

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

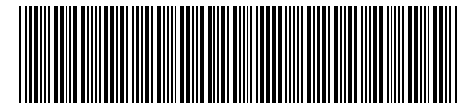
Jakarta, 24 November 2023
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Bahliil Lahadalia



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 1 dari 7

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. PAGU : Rp.1.229.295.942.000
(SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

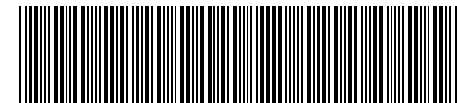
NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	065.01.ED	Program Penanaman Modal		0	704.125.998	106.106.104	0	810.232.102	260.720.434
	01	DKI JAKARTA		0	694.500.754	106.106.104	0	800.606.858	251.095.190
	017202	SEKRETARIAT UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	KP	0	40.868.574	0	0	40.868.574	36.326.079
	A00	RM		0	40.868.574	0	0	40.868.574	36.326.079
	650101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA	DK	0	374.756	0	0	374.756	374.756
	A00	RM		0	374.756	0	0	374.756	374.756
	650102	KANTOR DEPUTI BIDANG HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS	KP	0	44.931.990	0	0	44.931.990	0
	A00	RM		0	44.931.990	0	0	44.931.990	0
	650103	KANTOR DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL	KP	0	66.555.371	105.842.104	0	172.397.475	162.125.668
	A00	RM		0	66.555.371	105.842.104	0	172.397.475	162.125.668
	664848	KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	KP	0	55.792.967	0	0	55.792.967	6.098.822
	A00	RM		0	55.792.967	0	0	55.792.967	6.098.822
	664852	KANTOR DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL	KP	0	215.045.143	264.000	0	215.309.143	20.501.133
	A00	RM		0	215.045.143	264.000	0	215.309.143	20.501.133
	664869	KANTOR DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	KP	0	61.677.693	0	0	61.677.693	17.748.239
	A00	RM		0	61.677.693	0	0	61.677.693	17.748.239
	664873	KANTOR DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL	KP	0	39.098.626	0	0	39.098.626	3.119.136
	A00	RM		0	39.098.626	0	0	39.098.626	3.119.136
	664880	KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	KP	0	115.374.380	0	0	115.374.380	2.597.898

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 2 dari 7

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. PAGU : Rp.1.229.295.942.000
(SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

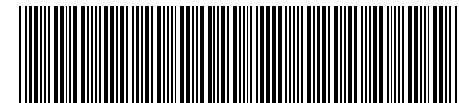
NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00 RM			0	115.374.380	0	0	115.374.380	2.597.898
	670650 KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL		KP	0	54.781.254	0	0	54.781.254	2.203.459
	A00 RM			0	54.781.254	0	0	54.781.254	2.203.459
	02 JAWA BARAT			0	282.229	0	0	282.229	282.229
	029002 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI		DK	0	282.229	0	0	282.229	282.229
	A00 RM			0	282.229	0	0	282.229	282.229
	03 JAWA TENGAH			0	304.171	0	0	304.171	304.171
	039002 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH		DK	0	304.171	0	0	304.171	304.171
	A00 RM			0	304.171	0	0	304.171	304.171
	04 DI YOGYAKARTA			0	293.280	0	0	293.280	293.280
	049001 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH		DK	0	293.280	0	0	293.280	293.280
	A00 RM			0	293.280	0	0	293.280	293.280
	05 JAWA TIMUR			0	276.053	0	0	276.053	276.053
	050016 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR		DK	0	276.053	0	0	276.053	276.053
	A00 RM			0	276.053	0	0	276.053	276.053
	06 ACEH			0	301.682	0	0	301.682	301.682
	060038 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH		DK	0	301.682	0	0	301.682	301.682
	A00 RM			0	301.682	0	0	301.682	301.682
	07 SUMATERA UTARA			0	288.998	0	0	288.998	288.998

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 3 dari 7

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. PAGU : Rp.1.229.295.942.000
(SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

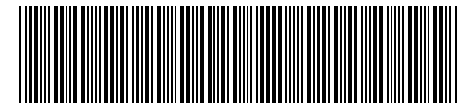
NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	079001	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA	DK	0	288.998	0	0	288.998	288.998
	A00	RM		0	288.998	0	0	288.998	288.998
	08	SUMATERA BARAT		0	308.955	0	0	308.955	308.955
	080022	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM & PTSP) PROV.	DK	0	308.955	0	0	308.955	308.955
	A00	RM		0	308.955	0	0	308.955	308.955
	09	RIAU		0	301.398	0	0	301.398	301.398
	099001	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	DK	0	301.398	0	0	301.398	301.398
	A00	RM		0	301.398	0	0	301.398	301.398
	10	JAMBI		0	310.026	0	0	310.026	310.026
	100098	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM DAN PTSP)	DK	0	310.026	0	0	310.026	310.026
	A00	RM		0	310.026	0	0	310.026	310.026
	11	SUMATERA SELATAN		0	297.420	0	0	297.420	297.420
	119002	DINAS PANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA	DK	0	297.420	0	0	297.420	297.420
	A00	RM		0	297.420	0	0	297.420	297.420
	12	LAMPUNG		0	305.723	0	0	305.723	305.723
	120020	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	DK	0	305.723	0	0	305.723	305.723
	A00	RM		0	305.723	0	0	305.723	305.723
	13	KALIMANTAN BARAT		0	310.908	0	0	310.908	310.908
	139001	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI	DK	0	310.908	0	0	310.908	310.908

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 4 dari 7

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. PAGU : Rp.1.229.295.942.000
(SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

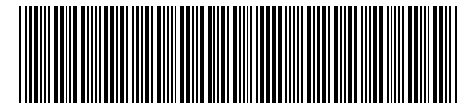
NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00 RM			0	310.908	0	0	310.908	310.908
	14 KALIMANTAN TENGAH			0	250.000	0	0	250.000	250.000
	140020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN	DK		0	250.000	0	0	250.000	250.000
	A00 RM			0	250.000	0	0	250.000	250.000
	15 KALIMANTAN SELATAN			0	278.149	0	0	278.149	278.149
	159002 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN	DK		0	278.149	0	0	278.149	278.149
	A00 RM			0	278.149	0	0	278.149	278.149
	16 KALIMANTAN TIMUR			0	307.716	0	0	307.716	307.716
	169001 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) PROVINSI	DK		0	307.716	0	0	307.716	307.716
	A00 RM			0	307.716	0	0	307.716	307.716
	17 SULAWESI UTARA			0	269.421	0	0	269.421	269.421
	170029 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI	DK		0	269.421	0	0	269.421	269.421
	A00 RM			0	269.421	0	0	269.421	269.421
	18 SULAWESI TENGAH			0	270.402	0	0	270.402	270.402
	180015 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI	DK		0	270.402	0	0	270.402	270.402
	A00 RM			0	270.402	0	0	270.402	270.402
	19 SULAWESI SELATAN			0	289.920	0	0	289.920	289.920
	190099 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) PROVINSI	DK		0	289.920	0	0	289.920	289.920
	A00 RM			0	289.920	0	0	289.920	289.920

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 5 dari 7

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. PAGU : Rp.1.229.295.942.000
(SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

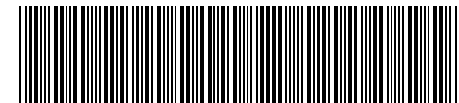
NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	20	SULAWESI TENGGARA		0	287.160	0	0	287.160	287.160
	200028	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP) PROVINSI	DK	0	287.160	0	0	287.160	287.160
	A00	RM		0	287.160	0	0	287.160	287.160
	21	MALUKU		0	281.407	0	0	281.407	281.407
	210023	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	DK	0	281.407	0	0	281.407	281.407
	A00	RM		0	281.407	0	0	281.407	281.407
	22	BALI		0	329.111	0	0	329.111	329.111
	220022	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	DK	0	329.111	0	0	329.111	329.111
	A00	RM		0	329.111	0	0	329.111	329.111
	23	NUSA TENGGARA BARAT		0	311.709	0	0	311.709	311.709
	230024	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB	DK	0	311.709	0	0	311.709	311.709
	A00	RM		0	311.709	0	0	311.709	311.709
	24	NUSA TENGGARA TIMUR		0	303.212	0	0	303.212	303.212
	249002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA	DK	0	303.212	0	0	303.212	303.212
	A00	RM		0	303.212	0	0	303.212	303.212
	25	PAPUA		0	272.309	0	0	272.309	272.309
	250024	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	DK	0	272.309	0	0	272.309	272.309
	A00	RM		0	272.309	0	0	272.309	272.309
	26	BENGKULU		0	296.436	0	0	296.436	296.436

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 6 dari 7

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. PAGU : Rp.1.229.295.942.000
(SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

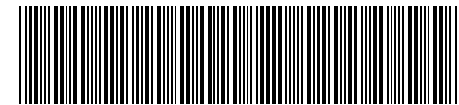
NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	260028	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	DK	0	296.436	0	0	296.436	296.436
	A00	RM		0	296.436	0	0	296.436	296.436
	28	MALUKU UTARA		0	259.149	0	0	259.149	259.149
	280023	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	DK	0	259.149	0	0	259.149	259.149
	A00	RM		0	259.149	0	0	259.149	259.149
	29	BANTEN		0	306.607	0	0	306.607	306.607
	290018	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP) PROVINSI	DK	0	306.607	0	0	306.607	306.607
	A00	RM		0	306.607	0	0	306.607	306.607
	30	KEP. BANGKA BELITUNG		0	306.139	0	0	306.139	306.139
	300015	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN	DK	0	306.139	0	0	306.139	306.139
	A00	RM		0	306.139	0	0	306.139	306.139
	31	GORONTALO		0	270.583	0	0	270.583	270.583
	310090	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	DK	0	270.583	0	0	270.583	270.583
	A00	RM		0	270.583	0	0	270.583	270.583
	32	KEPULAUAN RIAU		0	304.620	0	0	304.620	304.620
	320082	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN	DK	0	304.620	0	0	304.620	304.620
	A00	RM		0	304.620	0	0	304.620	304.620
	33	PAPUA BARAT		0	290.361	0	0	290.361	290.361
	330082	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	DK	0	290.361	0	0	290.361	290.361

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



DS:0608-5065-7345-3300

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 7 dari 7

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. PAGU : Rp.1.229.295.942.000
(SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00 RM			0	290.361	0	0	290.361	290.361
	34 SULAWESI BARAT			0	298.001	0	0	298.001	298.001
	340096 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI	DK		0	298.001	0	0	298.001	298.001
	A00 RM			0	298.001	0	0	298.001	298.001
	35 KALIMANTAN UTARA			0	261.989	0	0	261.989	261.989
	417745 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN	DK		0	261.989	0	0	261.989	261.989
	A00 RM			0	261.989	0	0	261.989	261.989
	065.01.WA Program Dukungan Manajemen			163.719.525	224.084.235	31.260.080	0	419.063.840	20.271.806
	01 DKI JAKARTA			163.719.525	224.084.235	31.260.080	0	419.063.840	20.271.806
	017202 SEKRETARIAT UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	KP		163.719.525	224.084.235	31.260.080	0	419.063.840	20.271.806
	A00 RM			163.719.525	224.084.235	31.260.080	0	419.063.840	20.271.806
	TOTAL			163.719.525	928.210.233	137.366.184	0	1.229.295.942	280.992.240
	RM			163.719.525	928.210.233	137.366.184	0	1.229.295.942	280.992.240
	PENDAPATAN						0	0	

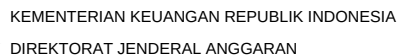
KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 24 November 2023
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalia



DAFTAR ISI
ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-065.01-0/2024



III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA | : | 065 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 065.01 Badan Koordinasi Penanaman Modal |
| 3. PAGU | : | Rp.1.229.295.942.000 |

(SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

Jakarta, 24 November 2023

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

